

Pola Partisipasi Kader Perempuan Partai Politik

(Studi Kasus : Kader Perempuan DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur)



Tryseptya Indah Permata

4825122508

**Skripsi yang ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tryseptya Indah Permata

No Registrasi : 4825122508

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pola Partisipasi Kader Perempuan Partai Politik (Studi Kasus: Kader Perempuan DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur)” ini sepenuhnya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atsa pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Jakarta, 17 Februari 2017



Tryseptya Indah Permata

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



[Signature]
Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama	TTD	Tanggal
1	<u>Dr. Ciek Julyati Hisyam, MM, M.Si</u> NIP. 19620412 198703 2 001 Ketua Sidang	<i>[Signature]</i>	16 February 2017
2	<u>Achmad Siswanto, M.Si</u> NIDK - 8846100016 Sekretaris Sidang	<i>[Signature]</i>	18 February 2017
3	<u>Abdi Rahmat, M.Si</u> NIP. 19730218 200604 1 001 Penguji Ahli	<i>[Signature]</i>	14 February 2017
4	<u>Ubedillah Badrun, M.Si</u> NIP. 19720315 200912 1 001 Dosen Pembimbing I	<i>[Signature]</i>	16 February 2017
5	<u>Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe, M.Si</u> NIP. 19650529 198903 2 001 Dosen Pembimbing II	<i>[Signature]</i>	16 February 2017

Tanggal Lulus: 3 February 2017

ABSTRAK

Tryseptya, Pola Partisipasi Kader Perempuan Partai Politik (Studi Kasus: Kader Perempuan DPD Partai Keadilan Jakarta Timur), skripsi, Jakarta: Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola yang terbentuk dari partisipasi kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera dan untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang menjadi hambatan bagi kader perempuan dalam berpartisipasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Total informan yang menjadi subjek penelitian berjumlah 7 orang, yaitu 2 orang pengurus DPD PKS Jakarta Timur dan 5 orang kader Partai Keadilan Sejahtera. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partisipasi politik, dan gender dalam politik

Hasil dari temuan penelitian, para kader perempuan partai keadilan sejahtera memberikan ruang untuk perempuan berpartisipasi dengan cara memberikan sebuah struktur khusus dalam kepengurusan. Dengan ini perempuan dapat dengan bebas berpartisipasi sesuai dengan minatnya. Partisipasi yang dilakukan kader partai seperti melaksanakan kegiatan sosial. Partisipasi yang dilakukan perempuan PKS merupakan suatu bentuk mobilisasi massa dengan tetap mengikuti aturan partai. Kader perempuan diposisikan menjadi bagian terdepan partai dikarenakan kemampuan perempuan yang dapat berkomitmen pada masyarakat. Namun yang menjadi hambatan adalah adanya batas-batas yang mengharuskan perempuan tidak bisa berpartisipasi dalam partai secara penuh, dikarenakan hal-hal yang bersifat individual. Seperti misalnya sulitnya membagi waktu antara perannya sebagai ibu dan kader. Selain itu budaya patriarki juga masih terlihat dalam struktur partai yang cenderung hanya memberikan ruang kepada perempuan pada bidangnya saja, selebihnya masih cenderung lebih mengutamakan laki-laki.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Perempuan dan politik, Partai Politik

ABSTRACT

Tryseptya, Participation Patterns of Woman Cadres In Political Parties (Case Study: Woman Cadres Of DPD Partai Keadilan Sejahtera In East Jakarta), skripsi, Jakarta: Major of Sociology, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, in 2017.

This study aimed to describe the patterns formed on the participation of women cadres of the Partai Keadilan Sejahtera and to describe any constraints that are a barrier for women cadres to participate.

This study used a qualitative approach with case study method. Total informants who are the subject of the study 7 people, they are two of the representative DPD Partai Keadilan Sejahtera in East Jakarta and five cadres of Partai Keadilan Sejahtera. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews (depth interview), and document research. The concept used in this study is the concept of political participation, and gender in politics.

The results of the study findings, woman cadres Partai Keadilan Sejahtera provides space for women to participate by providing a special structure in the management. With these, women can freely participate in accordance with their interests. The participation which has done as party cadres, there are social activities. Participation by women of Partai Keadilan Sejahtera is a form of mass mobilization, which still follows the rules of the party. Woman cadres are positioned to be the frontline of the party, because of women's ability to commit in society. However, the obstacle is the limits that require women can't fully participate in the party, because the things that individual. Such as, the difficulties of dividing time, between her role as a mother and also as a cadres. In addition the culture of patriarchy is still visible within the party structure which tends to only give space to women in the field, the rest still tend to prefer men.

Keywords : Participation Of Politic, Woman In Politic, Political Party

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala sesuatu yang baik, selalu datang disaat terbaiknya, persis waktunya. Tidak datang lebih cepat, pun tidak datang lebih lambat.

Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai dengan keyakinan”

- Tere Liye-

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS.94:6-7)

Sebuah persembahan untuk keluargaku tercinta, khususnya kedua orang tuaku tercinta dan untuk prodi dan almamater dimana penulis telah menghabiskan waktu untuk menimba ilmu selama empat setengah tahun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, Bimbingan dan Kekuatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penelitian dengan judul Pola Partisipasi Kader Perempuan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan selesai pada waktu yang tepat. Terima kasih untuk dukungan penuh dari Mama dan Papa serta kakak-kakak tersayang juga menjadi motivasi terbesar dalam penyelesaian penelitian ini.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi kewajiban akademis peneliti selaku mahasiswa Prodi Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta dalam memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Sosial. Selanjutnya skripsi ini juga ditujukan kepada pihak pemangku kepentingan pembangunan, sebagai bentuk kontribusi akademis peneliti

Dalam kesempatan ini pula, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah memberi dukungan kepada peneliti dari awal proses penelitian, penulisan dan hingga skripsi ini layak mendapatkan klaim akademis. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Robertus Robet MA. selaku Koordinator Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta.
3. Bapak Ubedilah Badrun, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kontribusi banyak atas waktu, pikiran, tenaga dan kesabarannya dalam membimbing. Dan tak lupa juga penulis sampaikan banyak – banyak terimakasih atas saran dan masukannya dalam penelitian ini.
4. Ibu Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan kontribusi banyak atas waktu, pikiran, tenaga dan kesabarannya

dalam membimbing. Dan tak lupa juga penulis sampaikan banyak – banyak terimakasih atas saran dan masukannya dalam penelitian ini.

5. Bapak Abdi Rahmat M,Si sebagai penguji ahli yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ciek Julyati, MM. M,Si sebagai ketua sidang penulis yang telah memberikan masukan dan kritikan untuk skripsi ini.
7. Bapak Achmad Siswanto, MSi selaku Sekretaris sidang penulis yang telah membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini
8. Para informan yang terlibat dalam penelitian ini Bapak Diki Junaidi, Ibu Sugianti,dan seluruh kerabat yang sudah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini terimakasih atas banyak pengalaman,bantuan,pengetahuan baru yang diberikan kepada peneliti selama ini.
9. Kepada Satria Novaldi yang telah serta memberikan semangat hingga memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih banyak.
10. Kepada sahabat terkasih : Indah Anggreiny yang dari awal kuliah sampe saat ini masih sabar dan setia menemani, dan juga, Mega, Naufal,Aditya, Salbi, Darisman, Baib yang juga telah mewarnai hari-hari ku dan telah memberikan dukungan dan semangat selama ini.
11. Kepada Bunda Titin, Kak Eka, Riza, Rita, dan Putri yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Fanny sahabat kecil yang tidak bosan mengingatkan dan menemani, terima kasih juga untuk Dina yang selalu memberikan masukan-masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman – Teman Sosiologi 2012 dan teman – teman SPR 12 terimakasih banyak!

Jakarta, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka Sejenis	9
F. Kerangka Konseptual	18
1. Partisipasi Politik	18
2. Gender dalam Politik	24
G. Metodologi Penelitian	26
1. Pendekatan Penelitian.....	27
2. Teknik Pengumpulan Data	28
3. Subjek Penelitian.....	29
4. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
5. Peran Peneliti	30
6. Teknik Triangulasi Data	31
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II Konteks Historis Partai Keadilan Sejahtera dan Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera	
A. Pengantar	35
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	37
1. Sejarah Pergerakan Partai	37
2. Sejarah Lahirnya Partai	39
3. Dinamika Politik PKS	43
4. Struktur Organisasi	44
C. Profil DPD PKS Jakarta Timur	45
D. Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera	46

1. Hubungan Kelembagaan Partai	47
2. Bidang Perempuan Ketahanan Keluarga	48
3. Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan	50
E. Profil Informan	51
F. Penutup	53
BAB III Pola Partisipasi Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera	
A. Pengantar	54
B. Perempuan dan Politik	55
C. Dinamika Perkembangan Politik Perempuan PKS	59
D. Pola Partisipasi Kader Perempuan PKS	62
1. Pola Pendekatan Kader Perempuan	66
2. Pola Rekrutmen Kader Partai	70
E. Penutup	73
BAB IV Perempuan dalam Politik Kepartaian	
A. Pengantar	75
B. Kedudukan Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera	76
C. Hambatan Perempuan Dalam Politik	84
D. Penutup	89
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	90
B Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Legislatif Tahun 1955 – 2014.....	3
Tabel 1.2 Tinjauan Penelitian Sejenis	16
Tabel 1.3 Karakteristik Informan	29
Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Kader Perempuan 2014-2016	61

Daftar Skema

Skema 3.1 Pola Partisipasi Perempuan PKS.....	64
Skema 3.2 Pola Pendekatan Kader Perempuan.....	66
Skema 3.1 Pola Perekrutan Kader Partai	70
Skema 4.1 Hambatan dan Peluang Partisipasi Kader Perempuan	85

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Kegiatan Cerdas Cermat Majelis Ta'lim.....	68
Gambar 3.2 Foto Kegiatan Pelayanan Kesehatan.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadirkan perempuan dalam politik merupakan perjalanan panjang dalam sejarah politik Indonesia. Dalam persoalan politik masih sering kali terjadi diskriminasi terutama persoalan gender. Di Indonesia pandangan yang melekat dalam masyarakat, politik adalah dunia laki-laki dan pandangan masyarakat pada perempuan adalah tidak layak dalam dunia politik disebabkan perempuan dikatakan tidak layak memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengutamakan emosinya.¹ Sebagian masyarakat cenderung beranggapan perempuan dapat berkerja hanya diranah domestik dan ranah publik adalah kewajiban laki-laki.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan hukum sendiri dalam mengatur dan menjamin setiap hak-hak warga negaranya dalam berpartisipasi dalam publik. Perempuan sebagai warga negara juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi. Indonesia mempunyai jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki namun dalam jumlah partisipasi politik masih cenderung sedikit. Peran perempuan dalam dunia politik jumlahnya terlihat tidak mengembirakan, Penentu kebijakan di pemerintahan baik di tingkat daerah ataupun

¹ Listyaningsih, "Partisipasi Politik Perempuan dan Pembangunan di Banten", *Jurnal Administrasi Publik*, Serang: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol.1, No 2, 2010, hlm. 156 diakses dalam halaman web <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49017&val=4026>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016.

kota masih didominasi oleh kaum laki – laki, tokoh politik perempuan masih sedikit jumlahnya dan masih tidak imbang dengan tokoh politik laki – laki. Berbagai faktor penghambat menyebabkan banyak perempuan di Indonesia tidak mau masuk ke dunia politik.

Kaum perempuan sangat minim kiprahnya dalam panggung politik, hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor sosial politik, sosial budaya, dan sosial ekonomi². Dalam faktor sosial budaya masih banyak yang menganggap bahwa perempuan terjun ke dunia politik adalah hal yang tabu, dan banyak juga peraturan-peraturan adat yang masih menghambat untuk perempuan terjun ke politik. Misalnya saja perempuan-perempuan di Bali, mereka berkewajiban mempersiapkan upacara adat dan kegiatan keagamaan lainnya setiap hari, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengenal politik. Dan masih banyak di daerah lainnya di Indonesia yang menganggap tabu perempuan berkecimpung di ranah politik. Sedangkan dari sisi sosial ekonomi perempuan, diberatkan dengan mahalnya ongkos politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif.

Selain faktor kultural yang menyebabkan sedikitnya jumlah partisipasi perempuan dalam ruang publik ada juga faktor struktural³. Sistem kaderisasi partai yang kurang membuka kesempatan untuk perempuan menduduki posisi strategis dalam partai memperkecil peluang perempuan berkiprah pada politik. Selain itu

² Nur Hasan,” Hambatan Umum Kiprah Perempuan Dalam Politik”, *Jurnal Perempuan*, Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan, Vol.2, No.1, 2013, hlm.2 diakses dalam halaman web <http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>, diakses pada tanggal 18 januari 2017.

³ Listyaningsih, op. cit.

kendala struktural tingkat pendidikan perempuan juga membuat pengaruh perempuan dalam ruang publik dan pembangunan. Sementara itu beberapa diskusi yang diarahkan kepada sedikitnya jumlah aktivis perempuan, karena sulitnya mendapatkan perempuan berkualitas dan berpendidikan yang mau terjun ke dunia politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik dimulai saat Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Partisipasi yang dilakukan bentuk nyatanya dan penggunaan hak politik perempuan tercermin pada pemilu 1955 dimana mereka memiliki hak memilih dan dipilih. Pada era reformasi saat ini, keterlibatan perempuan dalam politik disahkan DPR pada tanggal 18 februari 2012 dalam undang-undang pemilu No. 8 Tahun 2012 yang mengisyaratkan adanya kuota 30 % bagi perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 8 ayat 2 yang berbunyi ‘menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat’⁴.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Legislatif Tahun 1955 - 2014

Tahun Pemilu	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00

⁴ Undang-undang Pemilu diakses dalam halaman web <http://bawaslu-sumut.org/Undang-undang/42UU%20Nomor%2008%20Tahun%202012%20Tentang%20Pemilu%20DPR,%20DPD,%20dan%20DPRD.pdf> Diakses pada tanggal 1 Januari 2017.

Tahun Pemilu	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

Sumber :dikutip melalui <https://www.bps.go.id>

Pada nyatanya penerapan sistem kuota 30 % dalam pencalonan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif ini belum berjalan atau berkerja maksimal. Terlihat dari jumlah perempuan yang ada pada tabel 1.1, bahwa jumlah perempuan yang ada dalam legislatif masih belum mencapai kuota 30% . Angka tertinggi hanya mencapai 17 persen pada tahun 2009 dan 2014, sedangkan pada tahun-tahun yang lain angka pencapaian perempuan tidak hanya mencapai 12 persen. Penyebab kecilnya presentase tersebut yaitu kegagalan partai politik dalam bersungguh-sungguh memenuhi kuota tersebut.

Dalam sebuah jurnal dijelaskan Kewarganegaraan memberikan peluang kepada individu termasuk perempuan untuk berpartisipasi dalam politik⁵. Namun dalam penempatan caleg perempuan yang dilakukan partai politik terlihat hanya sebagai basis moral agar partai tersebut dapat mengikuti pemilu. Beberapa partai memaknainya sebagai menempatkan perempuan dalam urutan tiga, enam dan kelipatannya sehingga peluang terpilihnya perempuan juga kecil, apalagi jika ditempatkan di dapil (daerah pilihan) yang ukuran kursinya lebih kecil. Hal ini

⁵ Partini, Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia, *Jurnal Perempuan* Vol. 19 , No.2, 2014, Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan, hlm.78.

dikarenakan beberapa partai politik mengakui beberapa kandidat perempuan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh parpol tersebut. Perempuan kurang siap mengikuti serangkaian tes dan persyaratan karena rasa takut akan resiko yang diterima jika terlibat dalam kegiatan politik sehingga dapat membahayakan jiwanya (diteror).⁶

Partisipasi perempuan dalam politik juga dapat dipengaruhi ketika ada perempuan yang sudah terjun dalam dunia politik dan menjadi contoh untuk perempuan – perempuan lain untuk dapat berpartisipasi. Suatu penelitian pada tahun 2015 yang mengembangkan penelitian Campbell dan Wolbrecht's di tahun 2006⁷. Penelitian tersebut menguji efek role model pada tingkatan wilayah dan negara bagian dengan mengukur peran role model tersebut ke eksistensi mereka di masyarakat.

Dapat disimpulkan hasil dari penelitian tersebut bahwa pada dasarnya teori role model itu sederhana, para wanita muda akan bersemangat ketika ada sosok *role model* perempuan yang bersemangat menjadi panutan mereka. Dengan adanya wanita dalam politik sebagai *role model* di negaranya memberikan dampak positif terhadap partisipasi politik wanita, khususnya wanita muda. Akan ada peningkatan jumlah partisipasi politik pada wanita muda. Adanya *role model* wanita dalam politik

⁶ *Ibid.*

⁷ Mariani, Mack, dkk, "Party, Ideology and the Influence of Female Role Models On Young Women", *Political Research Quarterly*, USA:Xavier University, 2015 hlm. 716-731, diakses pada halaman web <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912915605904?source=mfr&rss=1&>, diakses pada tanggal 2 September 2016.

memberikan inspirasi terhadap kaum wanita dan semangat akan keterlibatannya dalam politik.

Di era reformasi saat ini, partai politik memainkan peranan penting dalam dalam menentukan arah pengambilan keputusan dari suatu kebijakan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, peranan partai politik menempati posisi penting dalam tegaknya pilar demokrasi. Tumbangnya rezim orde baru dan lahirnya reformasi melahirkan berbagai macam partai politik di Indonesia. Partai merupakan satu-satunya fasilitator untuk mencapai tujuan politik tertinggi. Kaum perempuan pun dapat memainkan perannya dalam partai untuk dapat membuktikan kemampuannya bersaing. Seharusnya partai-partai politik juga dapat membantu para perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Sekian banyak partai yang ada di Indoneisa berusaha untuk memenuhi kuota 30% tersebut. Pada tahun 2014 persaingan untuk mendapatkan bangku legislatif perempuan cukup ketat. Partai keadilan Sejahtera mendapatkan suara terkecil untuk menempatan perempuan. Dari 40 bangku yang tersedia perempuan hanya menempati satu bangku saja⁸. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai kader yang dimana jumlah kader perempuan cukup banyak. Di Jakarta partai ini mempunyai kader terbanyak didua wilayah yaitu selatan dan timur, paling terbanyak ada di Jakarta

⁸Perolehan suara perempuan di legislatif diakses pada halaman web http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/profil-anggota-legislatif-2014-2019-potensi-dominasi-fraksi-makin-kuat-2.html diakses tanggal 1 Januari 2017.

Timur jumlahnya mencapai 7728 kader perempuan⁹. Namun banyaknya jumlah tersebut tidak menjadi suatu keberhasilan partai memposisikan perempuan dilembaga legislatif.

Penjabaran diatas, memunculkan rasa ingin tahu dari peneliti tentang partisipasi perempuan sebagai kader partai untuk dapat menjalankan hak politiknya. Lalu bagaimana akhirnya pola yang terbentuk dari partisipasi politik mereka sebagai kader dan apa saja hambatan yang mereka dapatkan dalam berpartisipasi. Dengan mengambil studi kasus di daerah Jakarta Timur.

B. Permasalahan Penelitian

Hadirnya perempuan dalam politik tidak langsung menepis anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik disebuah partai masih belum memperlihatkan keberhasilan kuota 30%. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan membuat perempuan harus lebih berkerja keras untuk mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat. Penempatan posisi perempuan dalam sebuah partai juga menjadi satu faktor yang membuat sulitnya perempuan menempati posisi penting dalam sebuah struktur.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan untuk melihat kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera sebagai kader aktif dalam melakukan partisipasi politik. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan difokuskan

⁹ Data jumlah kader DPW Partai Keadilan Sejahtera.

pada beberapa perumusan masalah utama yang akan di jawab di bab selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana pola partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera?
2. Bagaimana hambatan dan peluang perempuan berpolitik dalam Partai Keadilan Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul *Pola Partisipasi Kader Perempuan Partai Politik* ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini mendeskripsikan pola partisipasi kader perempuan dalam partai Partai Keadilan Sejahtera. Partisipasi yang dilakukan didalam partai politik antara kader perempuan dan kader laki-laki memiliki tujuan sama dengan cara yang berbeda. Sehingga partisipasi yang dijalankan kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera membentuk sebuah pola yang akan menjadi kegiatan yang dilakukan rutin.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan hambatan-hambatan yang menjadi pennghalang partisipasi kader perempuan. Menghadirkan perempuan dalam politik bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan yang memutuskan untuk berpolitik tentunya sudah mempertimbangkan hal-hal yang akan menjadi penghalang dalam karir politiknya. Sebagai perempuan pasti memiliki banyak hambatan menjadi

seorang yang berpolitik, karena peran perempuan yang sangat penting dalam sebuah keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul *Pola Partisipasi Kader Perempuan Partai Politik*, secara garis besar memiliki dua manfaat yaitu secara akademis dan praktis. Secara akademis, studi ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu mengenai partisipasi politik perempuan serta mampu menambahkan kajian tentang partisipasi politik yang merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu sosiologi politik. Sedangkan secara praktis, studi ini diharapkan mampu memberikan masukan positif tidak hanya kepada Partai Keadilan Sejahtera tetapi juga kepada seluruh partai nasional dalam upaya meningkatkan angka partisipasi politik perempuan. Selain itu studi ini juga diharapkan dapat menjadi suatu informasi baru yang bisa dijadikan pembelajaran kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka Sejenis

Studi tentang partisipasi politik perempuan sudah dilakukan oleh banyak penulis baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan berlatar belakang bidang ilmu yang berbeda pula. Hal ini terlihat dari perbedaan fokus yang diangkat oleh para peneliti sebelumnya. Adanya perbedaan sudut pandang yang berbeda dalam mengangkat suatu fenomena dan cara penyajiannya merupakan hal yang menjadikan penelitian satu dengan penelitian yang lain menjadi berbeda. Untuk itu dalam memberikan gambaran

orisinalitas studi ini, penulis menggunakan tiga jenis tinjauan pustaka sebagai perbandingan.

Pertama, penelitian yang berjudul *Party, Ideology and The Influence Of Female Role Model On Young Women* oleh Campbell dan Wolbrecht's.¹⁰ Dalam penulisannya, penulis menggunakan *role model*¹¹ yang menginspirasi saat ini dan dipertajam dengan menghubungkan role model tersebut dengan ideologi dan keberpihakan politik. Penelitian tersebut menggunakan tiga *role model* perempuan berpengaruh di negaranya, yaitu Nancy Pelosi yang merupakan pembicara perempuan pertama ditahun 2007, Hillary Clinton calon presiden pada tahun 2007-2008 dan Sarah Palin kandidat wakil presiden dari Partai Republik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya ketiga *role model* tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan.

Kedua, tesis *Partisipasi Politik Perempuan di DPD PKS* yang ditulis oleh Dina Anggita Lubis.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan partai dalam membina kader perempuan untuk dapat maju dan menduduki lembaga legislatif, melihat partisipasi perempuan di dalam partai ini cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Partisipasi politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera relatif cukup tinggi, karena keterlibatan mereka bukan hanya pada saat pemilu saja, tetapi mulai dari proses awal mereka sudah menunjukkan partisipasinya.

¹⁰ Mack, Bryan, *Op.Cit.*

¹¹ Role Model dalam kamus Bahasa Indonesia artinya yang dapat di teladani.

¹² Dina Anggita Lubis, "Partisipasi Politik Perempuan Di DPD PKS", dalam *Tesis Program Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana*, (Medan:Universitas Sumatra Utara, 2009).

Dalam pemilu 2009 di Medan, calon legislative perempuan yang diajukan PKS sudah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 30%. Tetapi, tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Medan. Padahal jika dilihat kualitas calon legislative perempuan tidak kalah dengan calon legislative laki-laki, baik dari segi pengetahuan maupun pendidikan.

Secara empirik dan faktual, kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Daerah sangat rendah yaitu masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki. Dimana sistem dan struktur sosial patriarki masih menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki. Masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap kepentingan perempuan.

Ketiga, *Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai : Strategi Gender* yang ditulis oleh Shelly Adelina dan Ani Soetjipto.¹³ Jurnal ini membahas tentang permasalahan pada internal partai politik. Partai politik seharusnya menjadi hulu dari segala tindakan afirmatif, ternyata belum mampu dan belum berkomitmen kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan mereka. Ketika proses rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas dan promosi di dalam partai tidak dilaksanakan maksimal, hal tersebut menandakan belum adanya sikap

¹³ Shelly Adelina, Ani Soetjipto, *Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai : Strategi Gender, Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Vol.19, No.2, 2014, hlm. 59.

saling menghargai dan saling bergantung antara partai politik dengan anggota perempuannya. Hasil dari penelitian penulis terhadap struktur internal partai jika mengacu pada tiga strategi keadilan gender di arena politik, yang baru hadir dalam institusi partai adalah *women vocal point* yang berwujud Departemen Perempuan.

Analisis terhadap departemen perempuan dipartai terkait ideology gender yang mereka bawa kedalam partai ketika memutuskan untuk bergabung, memperlihatkan bahwa pada akhirnya keberadaan mereka didalam partai telah terpengaruhi kondisi konstetasi politik untuk hanya mengedepankan kepentingan partai mereka dan membantu sebagai pelaksana saja. Aktivist perempuan di dalam partai politik dan aktivis gerakan perempuan di luar partai politik perlu bersinergi guna memperkuat diri, menemukan sinergi dan terobosan baru ditengah kepartaian yang tidak kondusif saat ini. Gerakan perempuan juga perlu memperkuat gerakan sosial yang membentuk tindakan kolektif untuk menjadi basis konstituen yang mampu menjaga kepentingan partaipolitik, kepentingan perempuan dan tujuan jangka panjang.

Keempat, penelitian Partini yang berjudul *Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan*.¹⁴ Penelitian ini membahas Indonesia dalam konteks politik praktis mempunyai beberapa produk hukum yang menjamin hak seluruh warga Negara Indonesia agar dapat berpartisipasi aktif. Dari berbagai produk hukum

¹⁴ Partini, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Vol.19, No.2, 2014, hlm. 78.

menyatakan perempuan sebetulnya memiliki kesempatan yang sama dengan laki – laki untuk menjadi subjek politik yang berperan sebagai pengambil kebijakan. Dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan diyakini menciptakan dunia baru, dunia yang bebas diskriminasi dalam ranah politik.

Kenyataannya budaya politik di Indonesia masih belum kondusif mengikutsertakan perempuan dalam politik. Kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan perlu diupayakan dan didukung terutama oleh perempuan sendiri. Disinilah, pendidikan politik menjadi satu pilihan yang relevan agar perempuan tidak buta politik. Penguatan kapasitas perempuan tidak hanya sebatas pada output kesadaran perempuan untuk menjadi anggota parlemen, tetapi juga harus diimbangi oleh dukungan dari perempuan pemilih lainnya untuk berproses secara kritis, dialogis dan pantang menyerah. Dengan demikian dalam proses elektoral dalam sistem kewarganegaraan yang demokratis tidak hanya menghasilkan wacana keterwakilan, melainkan sebuah proses transformative antara parpol dan perempuan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sabar Maryati berjudul *Transformasi Perempuan Menuju Partai Politik*¹⁵. Tulisan ini membahas tentang kancah politik Indonesia, dimana keberadaan perempuan dalam politik Indonesia belum signifikan. Di Indonesia gerakan politik perempuan tidak begitu terdengar gaungnya.

¹⁵ Sabar Maryanti, “ Perempuan (Transformasi Menuju Partai Politik)”, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Vol.3, No1, 2011, hlm 25. Diakses melalui halaman web <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141300&val=5855>, diakses tanggal 19 Februari 2016.

Sedikitnya jumlah kaum perempuan yang terjun kedalam kancah politik menjadikan kepentingan kaum perempuan tidak tersuarakan. Salah satu penyebab kurangnya partisipasi politik perempuan adalah pemahaman yang keliru tentang konsep politik. Dengan demikian kedudukan perempuan di dunia politik masih relatif lemah. Meskipun saat ini emansipasi perempuan telah di buka lebar, tetapi masih ada ketidakberdayaan perempuan khususnya dibidang politik.

Berdasarkan kenyataan yang didasarkan teori dan pendapat para pakar, maka sangat penting adanya upaya untuk memberdayakan perempuan dalam bidang politik agar kaum perempuan bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perempuan dalam bidang politik seperti melibatkan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan tingkat lokal dan menggugah kaum perempuan dalam memillih kepemimpinan yang mempresentasikan kepentingannya. Pemerintah juga dapat melibatkan perempuan dalam membagi kekuasaan secara demokratis.

Keenam, jurnal *Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)*, Aisya Putri Budiarti.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang presentasi perempuan dalam parlemen di Indonesia . Partai

¹⁶ Aisya Putri Budiarti, Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD), *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol.15 No1, 2012, hlm 19-28. Diakses melalui halaman web <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/viewFile/15/9> , diakses pada tanggal 6 Januari 2017.

politik (parpol) sebagai satu-satunya “kendaraan politik” formal yang diakui oleh undang-undang tentu saja memiliki peran penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa partai politik memiliki komitmen yang rendah untuk melibatkan perempuan dalam struktur partai dan pemilu. Hal ini terwujud dalam tidak adanya kebijakan afirmasi dalam aturan internal partai, rendahnya keterlibatan perempuan sebagai pengambil kebijakan partai dan dalam pencalonan pemilu.

Partai politik yang tidak berkomitmen ini merupakan dampak dari tidak adanya aturan hukum yang mengikat bagi partai politik untuk menjalankan aksi afirmasi yang mendorong keterwakilan perempuan. Berpijak pada teori Anne Phillips dan Burnheim maka perubahan partai politik perlu dilakukan. Partai politik perlu menyertakan perempuan sebagai pemain politik di dalamnya, karena jumlahnya di dalam masyarakat yang begitu besar. Upaya perubahan tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan menerapkan aksi afirmasi dalam aturan hukum negara terkait partai politik maupun aturan internal partai politik.

Ketujuh, tesis *Partisipasi Politik Perempuan (Prespektif: Tradisi Islam Kudus)*¹⁷, Muhammad Zainuri, Universitas Diponegoro. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan konstruksi tradisi Islam lokal Kudus tentang partisipasi politik perempuan pada pemilu 2004 dan mendiskripsikan implikasi pemikiran tradisi Islam lokal Kudus terhadap kehidupan berpolitik perempuan di Kudus. Dari hasil penelitian

¹⁷ Muhammad Zainuri, “Partisipasi Politik Perempuan (Prespektif: Tradisi Islam Kudus)”, dalam *Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana*, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2007).

tersebut dapat penulis menyimpulkan bahwa kondisi perempuan dalam sosial politik terhadap tradisi Islam lokal Kudus pun tidak dapat dilepaspisahkan dari kitab-kitab Islam klasik diajarkan kiai di pesantren. walaupun tradisi Islam lokal Kudus sangat membatasi perempuan terjun dalam politik namun karena adanya motif rasional bernilai dan rasional bertujuan yakni dengan masuk menjadi anggota legislatif dapat menyalurkan bakat berorganisasi, memperjuangkan aspirasi perempuan dalam meningkatkan perluasan akses perempuan dalam wilayah publik melalui peraturan daerah, dan meningkatkan status sosial dan perekonomian keluarga sehingga mendorong perempuan terjun ke dunia politik praktis.

Tabel 1.2 Tinjauan Penelitian Sejenis

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Perbedaan		Persamaan
	Penelitian Tinjauan	Penelitian Penulis	
Mariani, Mack, dkk, "Party, Ideology and the Influence of Female Role Models On Young Women", <i>Political Reasearch Quartetly</i> , USA:Xavier University, 2015 hlm. 716-731, diakses pada halaman web http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912915605904?source=mfr&rss=1& , diakses pada tanggal 2 September 2016	Membahas mengenai Pengaruhnya role model terhadap partisipasi perempuan muda dalam negara tersebut	Membahas mengenai partisipasi perempuan dalam kaderisasi partai untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat	Membahas mengenai partisipasi perempuan sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat khussnya perempuan
Dina Anggita Lubis, "Partisipasi Politik Perempuan Di DPD PKS", <i>dalam Tesis Program Studi</i>	Membahas mengenai apa saja hambatan yang dialami calon legislatif	Membahas mengenai partisipasi kader dalam memajukan partai dan hambatan yang dialami kader	Menggunakan konsep yang sama yaitu partisipasi politik dan memiliki objek yang sama yaitu kader

<i>Pembangunan, Program Pasca Sarjana</i> , (Medan:Universitas Sumatra Utara, 2009).	perempuan PKS dan bagaimana strategi agar dapat memenuhi keterwakilan di legislatif	perempuan PKS dalam berpartisipasi politik	perempuan PKS
Shelly Adelina, Ani Soetjipto, <i>Keputusan Politik Perempuan dalam Partai : Strategi Gender</i> , <i>Jurnal Perempuan</i> , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Vol.19, No.2, 2014, hlm. 59.	Pembahasan dalam jurnal ini membahas internal partai politik yang seharusnya dapat berkomitmen melibatkan partisipasi perempuan	Pembahasan skripsi ini membahas partisipasi aktif kader perempuan dalam partai dan hambatan perempuan dalam berpartisipasi	Menggunakan konsep gender untuk membahas partisipasi politik
Partini, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia", <i>Jurnal Perempuan</i> , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Vol.19, No.2, 2014, hlm. 78.	Pembahasan partisipasi perempuan menggunakan konsep kewarganegaraan	Pembahasan partisipasi perempuan menggunakan konsep partisipasi politik dan gender dalam politik	Pembahasannya sama mengenai partisipasi politik perempuan yang saat ini belum terwujud penuh
Sabar Maryanti, "Perempuan (Transformasi Menuju Partai Politik)", <i>Jurnal Pemberdayaan Perempuan</i> , Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Vol.3, No1, 2011, hlm 25. Diakses melalui halaman web http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141300&val=5855 , diakses tanggal 19 Februari 2016.	Pembahasan dalam jurnal ini menjelaskan keberadaan perempuan dalam negara demokrasi yang di nomorduakan dalam politik	Pembahasan skripsi menjelaskan keberadaan partisipasi perempuan dalam partai	Pembahasannya mengenai peran partisipasi perempuan dalam politik
Aisya Putri Budiarti, <i>Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan</i>	Penelitian ini membahas tentang presentasi perempuan dalam parlemen melalui partai politik di Indonesia.	Penelitian membahas pola partisipasi perempuan dalam sebuah partai politik	Penelitiannya menggunakan partai politik dalam mengukur keberhasilan partisipasi perempuan

<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD), <i>Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</i>, Vol.15 No1, 2012, hlm 19-28. Diakses melalui halaman web http://widyariset.pusbinding.klat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/view/File/15/9 , diakses pada tanggal 6 Januari 2017.</p>			
<p>Muhammad Zainuri, “Partisipasi Politik Perempuan (Prespektif: Tradisi Islam Kudus)”, dalam <i>Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana</i>, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).</p>	<p>Membahas tradisi Islam Kudus dengan partisipasi politik perempuan</p>	<p>Membahas partisipasi perempuan dalam suatu partai politik</p>	<p>Keduanya menggunakan konsep yang sama yaitu partisipasi politik dan konsep gender</p>

Sumber : Analisis perbandingan tinjauan penelitian sejenis, 2016

E. Kerangka Konseptual

Penulis pada bagian ini akan menggunakan konsep yang sesuai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang sosiologis. Berikut adalah konsep yang digunakan:

1. Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi dipahami sebagai suatu proses ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan. Pada dunia politik, proses ikut ambil bagiannya seorang warga negara dalam aktifitas politik secara sederhana dapat diartikan sebagai partisipasi

politik. Saat ini kajian tentang partisipasi politik telah menjadi sub bidang kajian yang cukup penting tidak hanya dalam ilmu politik tetapi juga ilmu sosial. Partisipasi politik sebagai konsep politik yang di terima luas termasuk masih baru. bagi masyarakat barat sebelum abad ke-18, partisipasi politik merupakan barang asing.

Pemberian hak yang sama kepada laki – laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu demokratis baru dimulai awal abad ke-20. Bahkan di Swiss, hak perempuan baru diakui beberapa dasawarsa lalu. Di Amerika Serikat, keterlibatan orang-orang hitam (negro) dalam politik juga belum lama. Di beberapa negara timur tengah masih dijumpai adanya pembatasan terhadap kaum perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik (peran politik).

Dalam analisis politik modern politik merupakan suatu masalah penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan perkembangannya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.

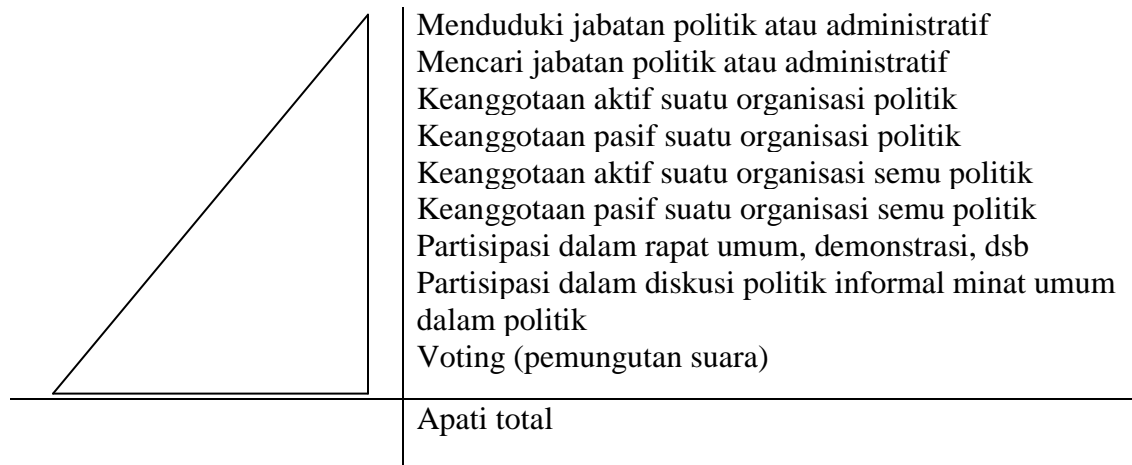
Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum¹⁸. Definisi umum dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah¹⁹. Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah²⁰. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

¹⁸ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 367.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 369.

Gambar 1.1 Hierarki Partisipasi Politik²¹



Partisipasi politik menurut Rush dan Althoff lebih luas cakupannya sehingga definisi tersebut melingkupi semua pengertian politik, yaitu kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan public (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Politik, Rush dan Althoff memberi batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik”.²²Rush dan Althoff mengajukan hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hierarki yang paling sederhana dan paling berarti ialah hierarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi.

²¹ Michael Rush dan Philip Althoff, 2008, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 122.

²² Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 180.

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka itu dibedakan dari partisipasi-partisipasi politik lainnya, dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal. Hal ini tidak menghapus pelaksanaan kekuasaan yang sesungguhnya, maupun pelaksanaan pengaruh oleh individu – individu atau kelompok – kelompok lain dalam sistem politik.

Dalam masyarakat primitive, politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan lain. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari suatu institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor komunikasi. Berlawanan dengan masyarakat totaliter, mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan.

Dalam masyarakat ada beberapa orang yang menghindar dari semua bentuk partisipasi politik atau hanya berpartisipasi dalam bentuk yang paling rendah saja. Macam-macam istilah diterapkan pada mereka yang tidak turut serta dalam partisipasi, mereka dilukiskan secara berbeda-beda sebagai apatis, sinis, alienasi (terasing) dan anomi (terpisah), istilah-istilah ini sama sekali tidaklah sinonim, walaupun dapat dihubungkan satu samalain dan barangkali memiliki cirri

karakteristik yang sama. Karena itu penting untuk membedakan istilah-istilah tersebut.

Apatis atau masa bodoh didefinisikan sebagai tidak punya minat atau tidak memiliki perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala – gejala pada umumnya atau pada khususnya²³. Dalam kaitannya dengan partisipasi politik, sifat paling penting dari seseorang yang apatis adalah kepasifan atau tiak adanya aktifitas politik. Tiga alasan yang dikemukakan Rosenberg mengapa individu apatis dalam kegiatan politik. Pertama, sebagai konsekuensi yang ditanggung dari aktifitas politik. Individu merasa aktifitas politik merupakan ancaman bagi setiap aspek kehidupannya. Kedua, individu dapat menganggap aktifitas politik sebagai sia – sia. Ketiga, tidak adanya perangsang membuat individu surut dari aktifitas politik, misalnya tidak adanya hasil langsung atau sedikit sekali yang diperoleh menyebabkan individu apatis.²⁴

Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga²⁵. Secara politik, sinisme menampilkan diri dalam berbagai bentuk, seperti: perasaan bahwa politik itu adalah urusan yang kotor, perasaan bahwa politisi tidak dapat dipercaya dan perasaan bahwa kekuasaan sesungguhnya dilaksanakan oleh orang – orang tanpa muka.²⁶ Alienasi sebagaimana dipahami

²³ Damsar, *Op.Cit*, hlm. 185.

²⁴ Michael Rush dan Philip Althoff, *Op.Cit*, Hlm. 144.

²⁵ Damsar, 2010, *Op.Cit*, hlm.186.

²⁶ *Ibid*, hlm. 147.

Rober Lane adalah perasaan keterasingan dari politik dan pemerintahan masyarakat²⁷. Ada juga yang mempunyai pandangan bahwa alienasi muncul karena individu atau warga dipisahkan dari kehidupan politik. Anomi, menurut Lane adalah perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah, dalam mana individu mengalami perasaan ketidakefektifan dikarenakan penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi terhadap tujuan – tujuan dan hilangnya urgensi bertindak.²⁸ Setelah dikemukakan strata dan tingkatan partisipasi politik, memberikan pemahaman bahwa berpartisipasi politik tidak hanya terbatas pada aktivitas di partai politik dan pemberian suara (votting), terdapat bentuk-bentuk lain yang dapat dipilih oleh para individu

2. Gender dalam Politik

Gayle Rubin, seperti yang dikutip oleh Dr. Riant Nugroho mendefinisikan gender sebagai suatu konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antara sex yang mengacu pada hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki²⁹. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang diskonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya: bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional

²⁷ Michael Rush dan Philip Althoff, *Loc. Cit.*

²⁸ Damsar, *Op, Cit*, hlm.149.

²⁹ Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, hlm ix.

atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kkuat, rasional, jantan dan perkasa, sehingga sifat-sifat pada gender bisa dipertukarkan satu sama lain³⁰.

Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jeis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbeaan laki-laki dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender³¹. Dalam politik, gender juga dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perwakilan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan membawa dampak bagi pera masinng-masing dalam politik. Konstruksi yang membudaya dalam masyarakat tentang perempuan yang lemah memunculkan peran dan tugas yang dibedakan dari laki-laki, begitu juga dalam hal politik.

Wacana tentang berbagai hal yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik diantaranya adalah masalah-masalah klasik yang muncul dari internal maupu eksternal perempuan. Joni Lovenduski mengungkapkan ada tiga rintangan sosila yang dihadapi perempuan untuk menjadi pelaku politik³². Pertama, lemahnya sumber daya yang diperlukan perempuan untuk memasuki wilayah politik. Kedua, kekangan gaya

³⁰ Hamid Arifin, Representasi Perempuan dalam Pers, *Jurnal Komunikasi Massa* vol.1, No 1, 2007, hlm 13. Diakses dari halaman web <https://www.scribd.com/doc/3198405/Jurnal-Komunikasi-Massa-Vol-1-No-1-Juli-2007> , pada tanggal 26 Januari 2017

³¹ Tanti Hermawati, Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender, *Jurnal Komunikasi Massa*, UNS: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.1, 2007, hlm 21. Diakses dari halaman web <file:///C:/Users/Septya/Downloads/Jurnal%20Komunikasi%20Massa%20Vol%201%20No%201%202007.pdf> , pada tanggal 26 januari 2017

³² Joni Lovenduski, 2005, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.88.

hidup yang menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik. Ketiga, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengejar karir politik dan juga merintangai rekrutmen mereka yang tampil kedepan.

Kendala yang dihadapi perempuan dalam berpolitik dijelaskan menjadi dua bagian³³. Pertama adalah kendala internal dari dalam diri perempuan yang meliputi sikap mental yang lemah, perempuan hanya dianggap sebagai second person: penempatan perempuan dalam posisi marginal atau domestifikasi peran perempuan yang terbatas pada wilayah domestik keluarga. kebanyakan perempuan masih bergantung secara ekonomi terhadap laki-laki atau suami sehingga menyulitkan bagi mereka untuk mengeluarkan dana untuk aktif dalam politik. Kedua adalah faktor eksternal yang muncul dari luar diri perempuan. faktor ini teridentifikasi menjadi beberapa hal seperti terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan public, lemahnya hubungan kemitraan pemerintah dengan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan, serta racunya format pemberdayaan perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik perlu dilakukan kerjasama oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perempuan itu sendiri

E. Metodologi Penelitian

³³ Tari Siwi Utami, 2001, *Perempuan Politik di Parlemen Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 22-25.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research* atau *qualitative approach*). Creswell mendefinisikan “pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia yang berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah”.³⁴ Peneliti memilih pendekatan ini karena kasus terbilang cenderung sensitif tetapi cukup menarik untuk dikaji.

Metode penelitian penting bagi peneliti sebagai alat untuk mempermudah penelitian, dan menjadikan penelitian agar tepat pada sasaran. Adapun fokus penelitian adalah menjelaskan bagaimana pola kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya perempuan. Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau seseorang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁵

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah deskriptif, untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi. Alasan dipakainya penelitian jenis deskriptif ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana pola yang digunakan dalam meyakinkan masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

³⁴ Creswell, John W, 2003, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach and Mixed Methods Approaches* (Second Edition), Thousand Oaks, London – New Delhi: Sage Publications, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini berdasarkan dengan melihat perkembangan partisipasi politik perempuan yang masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat umum, dan menyangkut permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, khususnya dalam pemenuhan hak politik mereka. Sedangkan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif, yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti suatu objek dalam hal ini peluang perempuan dalam berpartisipasi politik. Penelitian ini mendapatkan gambaran bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan didalam partai politik. Penelitian ini menjadikan dua pengurus partai sebagai informan utama. Selain itu, untuk mendukung dan keakuratan dan fakta-fakta yang ada dibutuhkan informan

pedukung. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak kader perempuan, kordinator wilayah dan simpatisan partai.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan laporan penelitian ini, peneliti memperoleh data dari berbagai sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang terpercaya dalam hal ini DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur dan data yang ditemukan peneliti secara langsung di lapangan, saat wawancara. Sedangkan, data sekunder adalah berasal dari studi pustaka berbagai aritikel, jurnal atau tulisan ilmiah terkait lainnya serta dokumentasi seperti foto. Peneliti melakukan wawancara dalam 2 jenis, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, agar informasi dan data yang didapatkan lebih lengkap dan akurat.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kunci yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti membagi dalam 2 (dua) kategori informan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah 2 (dua) orang pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera, yaitu ketua kaderisasi dan ketua bidang kewanitaan DPD Jakrta Timur. Selanjutnya sebagai informan pendukung 3 (tiga) orang kader Partai Keadilan Sejahtera, 1 (satu) orang simpatisan partai.

Tabel 1.3 Karakteristik Informan

No	Nama	Posisi	Peran dalam penelitian
1	Bapak Diki	Informan Kunci	Memberikan informasi tentang kader perempuan
2	Ibu Sugianti	Informan Kunci	Memberikan informasi tentang tugas kader perempuan
3	Ibu Titin	Informan Pendukung	Memberikan informasi tentang kegiatankader perempuan
4	Ibu Eka	Informan Pendukung	Memberikan informasi tentang kegiatankader perempuan
5	Ibu Fika	Informan Pendukung	Memberikan informasi tentang kegiatan kader perempuan
6	Ibu Retno	Informan Pendukung	Memberikan informasi tentang kegiatan kader perempuan

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat di mana peneliti bisa menemui informan utama yaitu dua orang pengurus DPD yaitu di sekretariat DPD PKS Jakarta Timur. Peneliti melakukan penelitian dengan beberapa informan pendukung dengan mendatangi tempat dimana diadakan acara partai dilingkungan sekitar mereka, seperti di Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk informan lain peneliti melakukan penelitian di daerah tempat tinggal mereka. Penelitian dilakukan pada bulan April 2016 hingga Juni 2016.

5. Peran Peneliti

Peneliti berperan untuk mengidentifikasi bias-bias, nilai-nilai, dan latar belakang pribadinya secara refleksif, seperti gender, sejarah, kebudayaan, dan status sosial ekonominya, yang bisa saja turut membentuk interpretasi peneliti selama penelitian.³⁶ Dalam pelaksanaan penelitian etika penelitian menjadi penting karena sedikit banyaknya akan mempengaruhi kelancaran dalam mengakses data atau informasi yang diperoleh. Dalam melakukan wawancara dan pengamatan langsung peneliti sebelumnya melakukan proses perkenalan kepada calon informan untuk meminta kesediaan calon informan sekaligus membangun tali silaturahmi, untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Penulis harus bersikap sopan agar informan merasa nyaman.

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai orang luar dan bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Kemudian menganalisis dan mengkajinya. Data yang disajikan antara lain berupa hasil wawancara. Data primer yang diperoleh dari DPD PKS Jakarta Timur sebagai sumber data yang pertama. Kemudian, peneliti mengkombinasikan data-data tersebut, mengolahnya untuk menggambarkan permasalahan penelitiannya. Untuk melihat permasalahan tersebut, peneliti memfokuskan pada pola yang dilakukan kader perempuan PKS dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan.

6. Teknik Triangulasi Data

³⁶ John W. Creswell, 2010, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 264-265.

Triangulasi dan *rich description* (deskripsi yang kaya) atau *thick description* (deskripsi mendalam), merupakan dua strategi validasi temuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan deskripsi mendalam berisi sejumlah ilustrasi yang saling menguatkan dan koheren sebagai bukti atas suatu temuan penelitian. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bukti sehingga temuan penelitian menjadi lebih hidup.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data sebagai cara untuk mengecek keabsahan data atau apakah data tersebut valid untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu untuk mengecek keabsahan data triangulasi juga dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan data lebih banyak. Pada proses analisis data, dalam memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi yang dilakukan peneliti yaitu teknik triangulasi data dengan sumber.

Menurut Moleong, triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa sumber yang lain.³⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan pemeriksaan kembali melalui hasil wawancara peneliti dengan ketua pengurus DPD PKS Jakarta Timur sebagai stakeholder terkait yang sekaligus sebagai ahli. Kesaksian para informan pendukung akan dinilai dan dibandingkan dengan penjelasan para stakeholder yang

³⁷ Lexy, J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 330.

terkait. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan atau gejala yang tampak lebih terlihat dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga keabsahan data dapat dinilai valid.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun kedalam 5 pembahasan atau bab. 5 bab tersebut merupakan sistematika penulisan yang telah disusun berdasarkan fungsi pada setiap bagian untuk menjelaskan maksud yang diharapkan penulis. Penyusunan berdasarkan pertimbangan yang matang agar pada setiap bagian tidak terdapat tumpang tindih pembahasan.

Bab I, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Peneliti juga memasukkan permasalahan penelitian dalam bab ini. Untuk menjadikan penelitian ini mengarah kepada penelitian yang Sosiologis dan memiliki karakteristik maka dijelaskan pula mengenai kerangka konseptual. Selain itu ada juga tinjauan sejenis dari penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu peneliti juga memasukkan metodologi penelitian dan juga sistematika penulisan dalam bab ini.

Bab II, bab ini peneliti memaparkan tentang sejarah Partai Keadilan Sejahtera mulai dari bermula terbentuknya partai hingga sejarah politik partai. Selain itu dijelaskan mengenai bidang kewanitaan yang ada dalam struktur partai, mulai dari tujuan bidang ini dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan bidang kewanitaan partai

keadilan sejahtera. Terakhir, peneliti juga memaparkan tentang profil DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur.

Bab III, pada bab ini peneliti lebih mendalami tentang bagaimana pandangan dari beberapa kader DPD PKS tentang perempuan dalam politik terutama pandangan dari bidang kaderisasi dan bidang kewanitaan partai. Kemudian, berusaha menelaah tentang pola partisipasi kader perempuan partai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan. Hal tersebut merupakan penjabaran tentang temuan permasalahan di lapangan.

Bab IV, pada bab ini merupakan analisis teori dan konsep hasil penelitian yang telah di jabarkan pada bab II dan III. Fenomena sosial tersebut dianalisis menggunakan teori sosiologi. Peneliti menganalisis bagaimana pola partisipasi perempuan dalam partai. Selain itu bagaimana pandangan sosiologi politik mengenai pola tersebut. Dalam bab ini peneliti membagi dalam tiga subbab pembahasan, dalam subbab pertama membahas pola partisipasi perempuan PKS dalam konsep partisipasi politik. Subbab selanjutnya memaparkan hambatan yang dialami perempuan untuk berpartisipasi. Terakhir membahas pengaruh konsep gender dalam politik.

Bab V, berisi kesimpulan atas penjelasan pada seluruh penelitian ini, khususnya penelaahan kesimpulan secara Sosiologis, serta beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait yang menangani masalah partisipasi politik perempuan dan masyarakat luas yang turut berpartisipasi.

BAB II

KONTEKS HISTORIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN KADER PEREMPUAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Pengantar

Peranan perempuan dalam bidang politik terbilang cenderung lemah. Stigma tentang perempuan berkerja dalam ranah domestik membuat perempuan terlambat berkiprah dalam politik. Pergantian masa ordebaru menuju reformasi mengalami berbagai perubahan yang memastikan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan agar berpihak kepada rakyat. Termasuk dalam mewajibkan perempuan untuk ikut serta dalam mengambil kebijakan yang dituang dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah mewajibkan setiap partai politik untuk mengikutsertakan perempuan setidaknya 30% untuk menjadi calon anggota legislatif. Adanya peraturan ini membuat semua partai berkerja untuk merekrut perempuan untuk aktif dalam partai sehingga pada akhirnya beberapa perempuan dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Sebelum dijadikan calon legislatif, perempuan yang ikut serta dalam partai harus berkerja untuk partai oleh karena itu dibentuklah suatu bidang perempuan dalam struktur partai.

Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera, partai berbasis Islam ini dalam strukturnya mempunyai satu bidang khusus untuk perempuan. Bidang ini

dinamakan bidang kewanita-an, yang terbentuk menjadi tiga biro. Bidang kewanita-an dalam partai ini sebagian besar kegiatannya adalah kegiatan sosial yang dengan mudah diterima di masyarakat.

Penulisan Bab II ini akan menjeaskan tentang situasi tempat yang menjadi lokasi penelitian. Pada bab kedua ini terlebih dahulu penulis akan mengemukakan secara umum tentang profil Partai Keadilan Sejahtera . Pada subab pertama akan dijelaskan deskripsi umum tentang Partai Keadilan Sejahtera. Pada bagian ini pula akan dijelaskan mengenai sejarah singkat Partai Keadilan Sejahtera, visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera, filosofi, dan struktur organisasi.

Selanjutnya, pada subab kedua akan dibahas pula gambaran bidang kewanita-an dalam partai keadilan sejahtera, sebagai bidang khusus dalam partai untuk aspirasi perempuan. Secara khusus pada bab ini juga membahas kegiatan kader perempuan dalam menarik perhatian masyarakat terhadap partai . Pada subab ketiga ini, akan dipaparkan secara singkat profil DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur sebagai fokus dalam penelitian ini dan profil singkat tiga kader yang menjadi informan dalam penelitian ini. Subbab terakhir penulis akan mendeskripsikan informan.

B. Sejarah (PKS) Partai Keadilan Sejahtera

1. Sejarah Pergerakan Partai

Periode tahun 70-an merupakan periode pergerakan yang menghadirkan pergerakan islam kontemporer³⁸. Di periode tersebut munculnya fenomena gerakan dakwah kampus di Indonesia. Munculnya fenomena tersebut dipengaruhi beberapa hal yaitu peristiwa revolusi islam Iran di tahun 1979 dan dipengaruhi juga oleh pemikiran – pemikiran yang bersumber dari buku – buku Timur Tengah diantaranya pemikiran Sayyid Qutub (tokoh ichwanul muslimin - Mesir), Fazlur Rohiman (Neo-Modernis Pakistan) dan Ali Shariati (Ideolog Revolusi Islam Iran)³⁹.

Dalam tulisannya gerakan dakwah kampus ini dimotori oleh Masjid Salman ITB, gerakan dakwah kampus ini menerima nilai – nilai modern seperti demokrasi, hak asai manusia namun dalam cara memahaminya berbeda dengan prespektif barat. Miichi kemudian meyakini tidaklah tepat jika melihat Pergerakan Islam Kontemporer di Indoneisa hanya dilihat secara dikotomis antara Islam Radikal dengan Islam Moderat. Sebab memang Pergerakan Islam di Indonesia spektrumnya amat beragam dan ini potensi besar bagi bangkitnya model pergerakan Islam yang makin matang dan menarik di Indonesia⁴⁰.

³⁸ Ken Miichi, Islamic Youth Movement In Indonesia, *IIAS Newsletter*, No 32, 2003 hlm.22. diakses melalui halaman web http://www.iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL32_22.pdf, diakses pada tanggal 1 April 2016.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

Setelah lebih dari tiga dekade masa pemerintahan otoriter Soeharto para aktivis di Indonesia kini memiliki ruang lebar untuk mengembangkan dan mengekspresikan pandangan mereka. Lengsernya Soeharto membuka jendela kesempatan yang lebar bagi persemaian gagasan dan gerakan aktivisme Islam. Definisi aktifisme Islam menurut Quintan Wiktorowicz adalah mobilisasi perjuangan dan gagasan untuk mendukung cita – cita kaum muslim.⁴¹ Aktivisme Islam bisa dikategorikan dua bentuk⁴².

Pertama, diwujudkan melalui kelahiran kembali partai – partai politik Islam. Definisi partai Islam disini diambil dari jurnal Anies Rasyid Baswedan yang berjudul *Politic Islam In Indonesia: Present and Future Trajectory* adalah partai – partai yang secara eksplisit mengklaim Islam sebagai ideology partai dan/ atau partai yang memiliki basis dukungan dari organisasi-organisasi atau kelompok Islam.⁴³ Kedua, era pasca-Soeharto pertumbuhan gerakan Islam dengan spectrum ideologi dan aksi yang beragam, mulai dari gerakan yang menoleransi kekerasan hingga cara-cara damai, dari gerakan Islam yang demokratis hingga anti-demokrasi. Partai politik Islam didefinisikan sebagai dimensi konvensional mekanisme politik formal. Partai politik dianaikan sebagai bagian inheren politik yang terinstitusionalisasi secara normal, dimana para aktivisnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjadi

⁴¹ Burhanuddin Muhtadi, 2012, *Dilema PKS (Suara dan Syariah)*, Jakarta: KPG, hlm. 1.

⁴² Ken Miichi, *Loc. Cit.*

⁴³ Burhanuddin, *Op. Cit.*, Hlm.2.

kandidat dalam pemilihan pejabat public, melakukan agreisasi kepentingan public melalui aktivitas lobi, legalisasi dan semacamnya.

Partai Keadilan Sejahtera lahir melalui gerakan sosial bernama tarbiyah yang kemudian beermutasi menjadi partai politik. Basis sosial partai ini adalah kelompok muslim terdidik, muda dan kelas menengah kota. Beda dari partai lain, partai ini mampu mendulang simpati public dengan memobilisasi kader dan simpatisannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial secara terus menerus dan tidak hanya menjelang pemilu. Partai Keadilan Sejahtera tampil sebagai “Partai Kader” yang menerapkan standar ketet dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya, dan membantu korban bencana alam di Indonesia.

2. Sejarah Lahirnya Partai Kedilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera lahir dari sebuah gerakan yang dinamakan gerakan tarbiyah. Awalnya gerakan ini berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di era orde baru. Gerakan ini dipahami sebagai alternative dari berbagai gerakan Islam saat itu. Pada masa orde baru penguasa masa itu melakukan epresi atau hambatan terhadap aktivitas Islam politik. Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif di sektor politik dengan membawa aspirasi agamanya.

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau yang disingkat PK, dalam sebuah konfrensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran

Baru, Jakarta⁴⁴. Presiden atau ketua partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi Ismail merupakan seorang pengajar atau dosen di perguruan tinggi yang cukup ternama di Bogor, yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya⁴⁵. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS,

⁴⁴ Zuly Qodir, 2013, *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, hlm. 132.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 140.

termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 – 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010⁴⁶. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 – 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

Visi dari partai ini adalah *Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat*⁴⁷. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Sedangkan misi dari partai ini

⁴⁶ *Ibid*, hlm.141.

⁴⁷ Visi diambil dari web resmi Partai Keadilan Sejahtera diakses dari halaman web <http://jepara.pks.id/visi-dan-misi-pks/>, diakses pada tanggal 6 september 2016.

adalah pertama Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

Kedua, Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Ketiga, Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

4. Dinamika Politik PKS

4.1 PKS Pada Pemilu 1999

Pada 30 Mei 1999, delapan partai politik berasakan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara hasil pemilu 1999⁴⁸. Pada 8 Juni 2002, PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini menuntut agar semua parpol peserta pemilu 1999 diikuti lagi dalam pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD⁴⁹.

4.2 PKS Pada Pemilu 2004

Pada pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendaptakn 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Pada pemilihan gubernur DKI 26 Maret 2007, PKS secara resmi mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar sebagai calon dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2007. Pasangan ini kalah dari pasangan Fauzi-Prijanto yang diusung oleh

⁴⁸ Zuly Qodir, *Op, Cit*, hlm.145.

⁴⁹ *Ibid.*

koalisi 15 partai politik. Walaupun dikeroyok koalisi 15 parpol, pasangan ini berhasil meraih 41,41% sedangkan pasangan Fauzi-Prijanto meraih 58,59%⁵⁰.

4.3 PKS Pada Pemilu 2009

Pada 9 Juli 2008, PKS memperoleh nomor urut 8 dalam PEMILU 2009 melalui pengundian nomor urut partai yang diadakan secara resmi oleh KPU. Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 57 kursi (10%) di DPR hasil Pemilihan Umum anggota DPR 2009, setelah mendapatkan sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu – satunya partai selain demokrat yang mengalami kenaikan jumlah presentase perolehan suara⁵¹.

Sebagian kalangan, internal maupun eksternal, melihat stagnasi perolehan suara PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai ini, terutama pasca Pemilu 2004. Kiprah beberapa elite partai di lembaga – lembaga public disorot media dan para kader hingga ke akar rumput, karena dinilai melenceng dari jati diri sebagai “Partai Dakwah”. Bahkan sejumlah (mantan) kader senior sempat berhimpun dalam Forum Kader Peduli (FKP) untuk memberikan kritik terbuka.

5. Struktur Organisasi PKS

Partai Keadlian Sejahtera memiliki struktur organisasi yang kuat dan rapi. Meski terlihat “gemuk”, karena memiliki departemen yang sangat banyak dan jumlah

⁵⁰ *Ibid*,146.

⁵¹ *Ibid*.

orang yang sangat banyak.sebagai sebuah strategi berpolitik. Dalam struktur terdapat sekretaris jendral, bendahara, dua bidang dan satu badan yang langsung dipimpin oleh presiden partai. Sekretaris jendral dibantu oleh wakil sekretaris terbagi lagi menjadi enam sekretaris bidang. Sedangkan bendahara partai hanya dibantu oleh dua wakil bendahara saja.

Dua bidang yang terdapat dalam struktur itu terbagi menjadi bidang sektoral dan bidang teritorial. Bidang sektoral dibagi menjadi sembilan bidang yang dimana bidang ini lebih untuk . Sedangkan bidang teritorial ini fokus dalam kemajuan dan perkembangan partai disetiap wilayah diseluruh Indonesia. Bidang ini terbagi menjadi tujuh wilayah. Badan dalam stuktur kepengurusan partai ini bertugas untuk mengatur struktur dan permasalahan internal partai.

C. DPD PKS Jakarta Timur

Dewan perwakilan daerah atau DPD merupakan sebuah struktur dalam partai keadilan sejahtera yang berada ditingkat daerah dan terbentuk dibawah kepengurusan wilayah. Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur terletak di Jl. Balai Pustaka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220. Kantor pengurus ini setiap harinya dijaga oleh dua penjaga security yang berkerja di kantor ini. Aktifitas kepartaiannya di DPD PKS Jakarta Timur ini terlihat dimulai dari sore hari sekitar pukul 16.00 hingga pukul 18.00 untuk kader perempuan dan malam hari untuk pengurus laki-laki.

Aktifitas pengurus DPD dimulai pada sore hari dikarenakan sebagian besar pengurus mempunyai aktifitas masing-masing seperti bekerja atau mengurus rumah tangga. Perbedaan aktifitas laki-laki dan perempuan disebabkan partai ini merupakan partai berbasis agama dan menerapkan aturan agama didalam aktifitas kepartaiannya. Ketika ada permasalahan bersama yang harus dimusyawarahkan akan dibicarakan pada hari libur dan dialokasikan waktu pada siang atau sore hari. Struktur kepengurusan DPD strukturnya tidak jauh berbeda dengan kepengurusan pusat. Dalam kepengurusan DPD tidak ada bidang teritorial dan badan. Stukturnya hanya ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang umum terdapat 16 bidang.

DPD Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur diketuai oleh Bapak Drs. H. Muhammad Taufiq Zoelkifli, yang baru menjabat kurang lebih satu tahun. Dibantu oleh pengurus inti pak Ikrar sebagai sekretaris dan Pak Rohmani sebagai sbendahara umum DPD. Dalam sturktur kepengurusan inti dari kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera, terlihat kader perempuan hanya difokuskan dibidang kewanitaan saja, dibidang yang lain didominasi laki-laki untuk kepengurusan inti dan perempuan hanya menjadi staff saja.

D. Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera

Pergantian masa orde baru ke masa reformasi menghasilkan kebijakan yang positif untuk pemberdayaan perempuan dibidang politik. Partai politik merupakan salah satu sarana partisipasi politik yang paling nyata. Keikutsertaan perempuan

dalam partai politik merupakan bentuk sederhana peranan perempuan dalam politik. Adanya bidang kewanitaan dalam struktur partai merupakan sebuah ruang yang diberikan partai untuk perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi secara penuh. Begitu juga yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera dalam setiap struktur kepengurusan mulai dari tingkatan paling tinggi yaitu wilayah sampai paling kecil yaitu tingkat RW, mempunyai bidang khusus untuk perempuan. Bidang perempuan dan ketahanan dalam partai ini memiliki 3 biro yaitu biro Hubungan Kelembagaan Partai (HKP), biro Bidang Pertahanan Ketahanan Keluarga (BPKK) dan yang terakhir biro Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan (PKKP). Dalam tingkatan daerah khususnya Jakarta Timur mempunyai bidang perempuan diketuai oleh Ibu Suganti. Bidang ini mempunyai visi “*Keluarga Kokoh, Kontribusi Untuk Negeri*”, artinya perempuan dapat berkerja untuk berkontribusi membangun negeri namun tidak melupakan keluarga dan dapat membangun keluarga yang kokoh.

1. Hubungan Kelembagaan Partai (HKP)

Hubungan Kelembagaan Partai adalah biro yang dibentuk khusus untuk menjalin silaturahmi antara lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dan juga menjalin silaturahmi antar partai. Salah satu organisasi yang terbentuk dari biro ini adalah *Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim (FORSITMA)*. Forum ini merupakan gabungan atau kumpulan dari majelis-majelis ta'lim perempuan. Kegiatan yang rutin

dilaksanakan forum ini adalah membuat kajian keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota majelis dan juga untuk menjalin silaturahmi antar majelis ta'lim.

Selain kegiatan forsitma, biro hubungan kelembagaan partai juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang kader partai lain untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Seperti kegiatan-kegiatan seminar atau kegiatan sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan tujuannya hanya untuk saling mengenal antar kader partai lain dan untuk saling bertukar pendapat atau ide dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpolitik. Biro ini di tingkat Jakarta Timur diketuai oleh Ibu Harlina.

2. Bidang Perempuan Ketahanan Keluarga (BPKK)

Bidang ini merupakan bidang yang fokus untuk melayani masyarakat umum dalam membantu memajukan ekonomi dan masalah-masalah sosial dimasyarakat. Di Ditingkat daerah Jakarta Timur biro ini diketuai oleh Ibu Retno Suprpti. Pada biro bidang pertahanan keluarga ini terbagi menjadi dua kegiatan besar yaitu:

- Pos Ekonomi Keluarga (Pos EK)

Pos Ekonomi Keluarga atau Pos EKA adalah sebuah kegiatan pelayanan dan pendayagunaan masyarakat berbasis Ekonomi yang dikelola oleh struktur bidang perempuan dan kader serta simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk kegiatan Pos EKA antara lain : Pendampingan, Pelatihan dan

Pembuatan Modul; Pembentukan Usaha Barang dan Jasa. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarganya.
 2. Meningkatkan peluang usaha, kerja dan penghasilan keluarga.
 3. Meningkatkan peran dan partisipasi keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
 4. Tercapainya peningkatan kesejahteraan keluarga Indonesia.
- Rumah Keluarga Indonesia (RKI)

Rumah Keluarga Indonesia atau RKI adalah suatu kegiatan dari bidang perempuan partai keadilan sejahtera untuk membenahi negeri. Banyak permasalahan yang muncul dimasyarakat dan untuk memecahkan permasalahan tersebut dimulai dari keluarga, karena pondasi utama adalah keluarga.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah keluarga Indoneisa sebagian besar adalah membuka konsultasi gratis bagi masyarakat yang ingin bertanya atau sedang mempunyai permasalahan dalam keluarga. selain memberikan konsultasi, rumah keluarga Indonesia juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan, *parenting* dan juga agama. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam membuat seminar atau pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Rumah Keluarga Indonesia mempunyai website yaitu <http://www.rumahkeluargaindonesia.com/>, berisikan berita

tentang kegiatan RKI dan juga artikel-artikel tentang keluarga. Website ini bisa diakses bebas oleh masyarakat luas.

3. Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan (PKKP)

Biro terakhir dari bidang perempuan yaitu PKKP atau peningkatan kapasitas kader perempuan. Biro ini terkait dengan peningkatan mutu kualitas kader yang dimiliki partai keadilan sejahtera khususnya perempuan. Biro ini mengadakan kegiatan yang berhubungan untuk peningkatan kinerja dari kader-kader perempuan PKS, seperti diklat dan pelatihan-pelatihan kader. Mengingat minimnya pengetahuan politik yang dimiliki perempuan sehingga perlu diperluas agar kualitas kader partai semakin baik. Selain dibidang politik, peningkatan kapasitas partai dilakukan dengan memberikan kegiatan yang berkaitan dengan psikologi atau pengetahuan sosial lainnya. Tujuan biro ini adalah meningkatkan mutu kapasitas dan kualitas kader-kader PKS. Di Jakarta Timur biro ini diketuai oleh Ibu Siti Mahmudah.

E. Profil Informan

1. Bapak Dicky Junaedi

Bapak Dicky Junaedi seorang guru di SMA Al-Azhar Kelapa Gading. Pak Dicky saat ini memegang jabatan sebagai ketua kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera Jakarta Timur. Beliau yang mengatur tugas secara umum bidang kaderisasi partai tingkat DPD. Dari SMA sudah aktif di organisasi-organisasi agama, sehingga

membuat Beliau tertarik belajar lebih jauh. Pada akhirnya membawa beliau untuk memutuskan bergabung dengan partai keadilan sejahtera ini.

2. Ibu Sugianti

Ibu Sugianti merupakan seorang kader Partai Keadilan Sejahtera bertempat tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Perjalanan panjang telah dilewati Ibu Sugianti untuk akhirnya dipercaya menjadi ketua bidang perempuan dalam partai tingkat daerah. Berawal sejak kuliah mengenal organisasi kepartaian ini, Ibu Sugianti yang merupakan lulusan sarjana sosial ini merasakan bahwa partai yang dinaunginya saat ini memiliki kesamaan visi dengan beliau. Memutuskan untuk berkontribusi untuk pembangunan negara maka saat ini kegiatan beliau selain menjadi guru, beliau ditugaskan menjadi ketua bidang perempuan Partai Keadilan Sejahtera ditingkat Jakarta Timur.

3. Ibu Titin

Seorang Ibu yang mempunyai satu anak, sudah lama bergabung dengan partai berbasis Islam sejak tahun 1992. Ibu Titin yang akrab dipanggil 'bunda' bergabung dengan partai sejak duduk dibangku kuliah. Diperkenalkan dengan lingkungan yang agamis, membuat Ibu Titin memutuskan untuk berhijrah dengan mendalami pahamana agama. Berawal dari seringnya mengikuti pengajian dengan kelompok kecil membuat bunda semakin yakin untuk bergabung dalam partai. Cukup lama bergabung dalam partai, ibu ini memutuskan hanya untuk menjadi kader biasa saja

dan aktif ditingkat kelurahan. Alasan ini diambil karena kesibukannya berkerja dan merawat anaknya yang masih duduk di Sekolah Dasar. Menurutnya, cukup hanya dengan berdakwah dilingkungan sendiri itu sudah membantu kontribusi dalam partai.

4. Ibu Eka

Perempuan kelahiran tahun 1989 ini saat ini menjadi pengajar di taman kanak-kanak Islam terpadu. Berawal dengan memiliki teman-teman yang agamis membuat Ibu Eka ingin belajar lebih jauh tentang pemahaman agama. Pemahaman soal dakwah dalam Islam meyakinkan Ibu Eka untuk ikut dalam berdakwah dengan lingkungan lebih luas. Dengan bergabungnya kedalam partai membuat Ibu Eka memperluas lingkungan dakwahnya. Saat ini ibu Eka merupakan kader aktif dalam partai di wilayah duren sawit. Dengan semangat dakwah yang besar ibu Eka pun tidak pernah bosan mengajak sekitarnya untuk ikut bergabung dan berbuat perubahan untuk negara.

5. Ibu Retno

Ibu Retno merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Aktif mengikuti dan mengajak teman-temannya untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan PKS. Ibu Retno menngenal partai melalui anak pertamanya yang merupakan kader aktif dalam partai yang bernama Fika. Ibu dari tiga orang anak perempuan ini awalnya masih ragu untuk mengikuti acara-acara kepartaian. Namun karena melihat

perubahan positif dari sang anak, maka ibu Retno memutuskan untuk ikut kedalam setiap acara partai.

F. Penutup

Partai Keadilan Sejahtera lahir dari pemahaman ideologi agama yang kuat dan mengadaptasi ajaran-ajaran timur tengah. Bermula dari sebuah gerakan menjadikan partai ini sebagai partai yang berbasis gerakan sosial dengan kader-kader muda yang jumlahnya cukup banyak. Partai Keadilan Sejahtera yang dulunya bernama Partai Keadilan mempunyai visi mewujudkan masyarakat madani yang adil, bermartabat dan sejahtera. Partai ini memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dan memiliki struktur bidang perempuan sendiri. Bidang perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera memiliki tiga biro besar yang pada dasarnya ketiga biro tersebut memiliki kegiatan sosial untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. ketiga biro tersebut dikelola oleh para kader-kader perempuan PKS dan dibantu oleh kader laki-laki dalam hal-hal pelaksanaan kegiatan.

BAB III

POLA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Pengantar

Pembangunan sebuah negara tidak terlepas dari unsur politik didalamnya. Dunia politik memiliki peran yang penting dalam pembangunan. Indonesia menganut sistem politik demokrasi, yang artinya semua masyarakat bisa berperan dalam membangun negaranya, tidak melihat perbedaan termasuk perbedaan gender. Namun seringkali masih terjadi pembeda antara perempuan dan laki-laki terutama dalam dunia politik. Sebagian besar masyarakat mempercayai urusan politik merupakan pekerjaan laki-laki.

Peranan politik dikendarai oleh partai politik. Banyak partai politik yang telah lahir dan masuk ke sistem politik di Indonesia. Melihat masih minimnya jumlah perempuan yang mau berpolitik di Indonesia, menjadi tugas partai politik untuk memberikan kesempatan dan mengajak perempuan untuk ikut dalam politik. Partai politik merupakan salah satu wadah untuk perempuan berpartisipasi politik. Partai politik harus dapat memberikan kepercayaan dan kesempatan terhadap perempuan untuk ikut berkerja dalam partai.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai berbasis Islam dan sering disebut partai kader. Partai ini mempunyai cukup banyak kader tidak terkecuali adanya kader perempuan. Kesuksesan suatu partai tidak terlepas dari kontribusi para kadernya

untuk memajukan partai dan mengajak masyarakat untuk dapat memilih partai tersebut.

Bab III ini menjelaskan tentang penemuan di lokasi penelitian. Dimana penemuan tersebut, antara lain tentang bagaimana perempuan dalam politik saat ini. Setelah itu, bagaimana dinamika perkembangan politik perempuan dalam partai. Pola yang terbentuk dari partisipasi politik kader perempuan partai Data yang demikian diperoleh sudah di bahas di bab sebelumnya, sehingga akan semakin memperkuat data.

B. Perempuan dan Politik

Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun negara. Politik dalam negara demokrasi merupakan sebuah kebebasan dan milik siapapun. Namun, dalam dunia politik masih didominasi oleh kaum laki-laki, perempuan cenderung takut untuk menjadi bagian dari politik. Hal ini disebabkan adanya persepsi masyarakat umum yang menghubungkan dunia politik dengan laki – laki. Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang membuat sedikitnya perempuan yang berani berpolitik.

“Indonesia banyak sekali budaya yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat, mulai dari mempengaruhi pemikiran, sehingga menjadi adat kebiasaan. Dari dulu sebagian besar berfikir perempuan itu kerjanya ya dirumah, dibanding menunjukkan diri di publik, kerja dirumah aja ngurus keluarganya. Makanya kenapa perempuan jaman dulu kebanyakan Cuma tamatan sma. Sehingga sekarang kalo ada perempuan berpolitik itu ya keliatan spesial gitu, tapi makin kesini masyarakat semakin cerdas jadi soal perempuan berpolitik semakin bisa dipahami namun memang masih sulit memperbanyak jumlah perempuan di politik. Engga bisa sembarang orang istilahnya untuk meyakinkan mereka politik harus ada orang yang mereka percaya baru mereka mau berpolitik.”⁵²

⁵² Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Diki Junaedi pada tanggal 13 Mei 2016 Pukul 18.30.

Pemikiran masyarakat umum tentang perempuan masih dipengaruhi oleh budaya masa lalu, sehingga ketika dimasa orde baru ada perempuan yang berpolitik menjadi suatu yang baru dan terkadang sulit diterima. Dalam politik tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin bergabung didalamnya, bahkan untuk berpolitik disebuah negara merupakan sebuah hak warga negara. Bagi sebagian besar masyarakat mengukur keberhasilan seorang perempuan dari kemampuan perempuan itu mengelola rumah tangga. Tantangan terbesar dari perempuan adalah ketika perempuan mempunyai peran ganda menjadi seorang ibu atau wanita karir. Seiring berjalannya waktu, berubahnya jaman saat ini perempuan sudah banyak yang berani untuk berpolitik. Bahkan saat ini negarapun sudah serius mengatur agar perempuan dapat lebih banyak yang hadir dalam politik. Keseriusan itu tertuang dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang khusus untuk perempuan.

“Indonesia itukan negara yang demokratis, tidak ada larangan bagi siapapun untuk berpolitik. Tidak ada larangan tertulis dimanapun yang melarang perempuan itu berpolitik, yang membuat larangan itukan sebenarnya dirinya sendiri, dibuat larangan itu juga untuk keluarganya sendiri dan bukan untuk masyarakat.”⁵³

Perempuan yang berkontribusi dalam politik jumlahnya masih cenderung sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan kekhawatiran dari perempuan sendiri dan kurangnya kepercayaan yang diberikan masyarakat ketika perempuan itu berpolitik. Kekhawatiran itu datang terutama dari keluarga jika perempuan berpolitik, akan lupa peran dan kewajibannya. Hal seperti ini yang menjadi pemikiran pada masyarakat sehingga sulit ketika mengharapkan banyak

⁵³ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khoerssholeh pada tanggal 17 September 2016 Pukul 12.30.

perempuan yang akan sadar tentang politik. Perlunya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat untuk mendorong perempuan berpolitik, dikarenakan pembangunan negara tidaklah semata hanya pekerjaan laki-laki. Perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembangunan negara, adanya kepentingan perempuan yang mengharuskan adanya perempuan yang berpolitik. Sehingga ketika perempuan berkontribusi dalam politik maka akan meminimalisir diskriminasi kepentingan antara perempuan dan laki-laki.

“Masyarakat kita ini masyarakat yang cerdas, tapi terkadang beberapa masyarakat gampang terpengaruh dengan pemberitaan media. Ketika mereka hanya bergantung kepada media dan tidak mencari tahu atau melihat sumber lain. Akan ada pemikiran seperti buat apa dia memilih yang nanti akhirnya begini, mau kasih aspirasi kemana nanti juga keputusannya sesuai dengan kepentingan mereka. Pemikiran yang seperti ini membuat rendahnya partisipasi kita, terutama perempuan yang mudah sekali terpengaruh”⁵⁴

Menentukan pilihan untuk bergabung kedalam partai bukanlah hal yang mudah. Banyaknya partai di Indonesia membuat masyarakat lebih selektif untuk dapat bergabung dalam partai. Visi dan misi sebuah partai mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih untuk bergabung dalam sebuah partai. Selain itu, kepengurusan dan program kerja yang jelas juga menjadi suatu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam keputusannya untuk bergabung. Terutama untuk perempuan yang mau bergabung dalam partai, harus mempertimbangkan posisi perempuan didalam partai tersebut dan kegiatan atau program kerja apa saja yang khusus melibatkan perempuan.

⁵⁴ Wawancara dengan Bu Retno pada tanggal 5 Oktober 2016 Pukul 11.00

Adanya kegiatan-kegiatan kepartaian yang bersifat umum memiliki penilaian tersendiri dimasyarakat terhadap partai. Hal-hal seperti inilah terkadang menjadi senjata partai untuk dapat membuat perempuan tertarik untuk bergabung atau sekedar menjadi partisipan partai. Dalam memilih cara untuk berpartisipasi tidak semua masyarakat percaya partai, apalagi dengan banyak pemberitaan politik saat ini membuat politik dan partai politik membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Hal ini berdampak juga terhadap angka partisipasi politik perempuan.

Kegiatan-kegiatan yang dibuat bersifat sosial dan melibatkan masyarakat umum merupakan salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat dalam berpolitik. Kegiatan tersebut merupakan suatu pendekatan partai dan cara memperkenalkan partai ke masyarakat, khususnya memperkenalkan bagaimana visi dan misi partaiitu sendiri. Cara tersebut juga bukan hanya untuk menarik masyarakat umum tetapi juga untuk menjalin silahturahmi ke sesama partai politik.

“memang tidak mudah untuk meyakinkan perempuan soal politik, makanya dengan kegiatan-kegiatan positif yang kita buat dimasyarakat adalah salah satu cara memperkenalkan partai kemasyarakat. Terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan”⁵⁵

Dengan adanya kegiatan tersebut yang diharapkan adanya kesadaran untuk perempuan dalam berpartisipasi. Selain itu diharapkan tingkat partisipasi perempuan dapat bertambah. Ketika politik diwarnai oleh kehadiran perempuan maka akan terjadi keharmonisan dalam membangun negara.

⁵⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sugianti pada tanggal 11 Mei 2016 Pukul 17.00.

C. Dinamika Perkembangan Politik Perempuan PKS

Partai Keadilan Sejahtera dikenal sebagai salah satu partai yang berbasis agama sehingga partai ini dapat memikat para kadernya dengan ilmu-ilmu keagamaan yang dituangkan dalam politik. Partai keadilan sejahtera sudah dibentuk sejak masa reformasi, yang dimana sebelumnya partai ini bernama partai keadilan. Proses pembentukan partai ini berasal dari gerakan-gerakan dakwah kampus yang mengutamakan nilai agama dalam perpolitikan sebagai basis dari gerakan partai. Pembentukan partai yang berawal dari gerakan dakwah kampus membuat banyak pemuda yang mengatasnamakan agama tertarik untuk bergabung dalam partai ini, tidak terkecuali para perempuan yang aktif dalam gerakan dakwah kampus.

Partai ini memiliki kader yang berasal dari pergerakan dakwah, artinya mereka yang memiliki tujuan untuk berkontribusi penuh pada agama. Mereka juga kebanyakan berasal dari lingkungan kampus. Sebagai partai yang dikenal dengan partai kader ini dalam merekrut kader menerapkan standar yang ketat dalam proses rekrutmen. Banyak kader yang bergabung dari awal pembentukan partai yang bertahan sampai sekarang. Berawal dari bergabung dengan organisasi keagamaan dan mempunyai visi yang sama pada akhirnya membuat mereka bergabung ke organisasi kepartaian ini.

Berawal dari tahun 1990-an bermunculan aktivis-aktivis kampus yang bergerak dibidang dakwah dan kemudian tertarik bergabung dalam gerakan partai dan

memutuskan untuk bergabung. Diawal kemunculannya partai yang berbasiskan agama ini hanya dapat melakukan kegiatan mereka hanya diruangan tertutup seperti masjid atau dirumah salah satu kader. Tidak hanya kader laki-laki tetapi juga dengan para kader perempuan. Karena pada era orde baru merupakan masa yang sulit untuk mengeluarkan pendapat dan tidak boleh adanya gerakan-gerakan massa dimasa itu, sehingga penggerakan yang dilaukan kader-kader PKS dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh kekhawatiran.

“waktu dijamin orde baru itu paling banyak tantangan, waktu itu kalo mau melakukan sesuatu misalnya kajian atau ada pembahasan apapun itu harus hati-hati banget. Sampe alas kaki aja itu dikantongin dibawa masuk. Karena waktu itu kan masih ada aturan tidak boleh ada organisasi-organisasi masyarakat jadi ya kalo kita mau bahas sesuatu harus mencari tempat yang aman. Beda dengan masa reformasi tidak ada larangan jadi bisa bebas melakukan kegiatan kita”⁵⁶

Organisasi-organisasi yang lahir perlu dukungan untuk dapat bertahan oleh karena itu banyak sekali kegiatan untuk mengumpulkan dukungan agar dapat bertahan dalam perpolitikan Indonesia. Tidak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera, partai yang bermula dari organisasi gerakan sosial ini meresmikan diri menjadi partai. Dengan bantuan penuh kader-kadernya partai ini menjadi salah satu partai besar di Indonesia.

Ditahun 2004, pertarungan politik di Indonesia sedang memanas. Semua partai politik berlomba menarik para pemilih untuk memilih partainya, termasuk partai keadilan sejahtera. Berbagai banyak kegiatan dibuat untuk menarik hati masyarakat terhadap partai. Dalam periode ini, pergerakan partai tidak terlepas dari

⁵⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Titin pada Tanggal 1 November 2016 Pukul 08.45.

peran kader perempuan yang semakin aktif dan gesit untuk membuat sebuah kegiatan dalam mempromosikan partai. Para kader perempuan difokuskan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih didominasi untuk ibu-ibu dan para remaja. Tujuannya untuk dapat meyakinkan kaum ibu dan remaja bahwa partai politik bukanlah suatu yang menyeramkan dan hanya soal tentang berebut kekuasaan.

Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Kader Perempuan 2014-2016

DPD PKS Jakarta Timur

TAHUN	JUMLAH KADER
2014	4868
2015	7193
2016	6905

Sumber: DPW PKS DKI Jakarta

Jumlah kader perempuan dari tahun ke tahun mengalami perubahan seiring dengan kesibukkan para perempuan mengurus urusan pribadi masing-masing. Para kader yang bertahan merupakan mereka yang dapat membagi adil perannya antara mengurus keluarga dan karir politik mereka. Perkembangan kader perempuan dalam partai juga sangat bergantung kepada pembawaan kader perempuan untuk meyakinkan orang-orang sekelilingnya.

“perkembangan kader terlihat pasang surut ya sejak awal partai terbentuknya partai, pasang surutnya ya faktor-faktor alasan pribadi. Tapi semakin kesini sih banyak saja jumlah perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik. Satu pemikiran sama visi partai jadi semakin banyak aja sih perempuan yang ikut gabung ya walaupun hanya sekedar partisipan tapi sudah cukup banyak meramaikan partai”⁵⁷

⁵⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Titin pada Tanggal 1 November 2016 Pukul 08.45.

Dari tahun 1998 sampai saat ini kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera mengalami pasang surut. Sebagian besar dikarenakan keyakinan mereka untuk tetap bertahan dalam partai dan bagaimana cara mereka membuat kepercayaan orang-orang diluar partai untuk dapat bergabung dalam partai. Tidak ada paksaan untuk bergabung dan bertahan. Banyak juga para kader yang mundur dari partai dikarenakan sulitnya membagi peran antara perempuan sebagai ibu dirumah dan perempuan sebagai kader partai.

“Jumlah kader perempuan PKS di Jakarta terbanyak itu ada dua wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jumlah kader di Jakarta Timur seluruhnya ada 13000 kader, ini Jakarta Timur aja. Untuk kader akhwatnya totalnya ada 6905 kader akhwat”⁵⁸

Jumlah kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera terbilang cukup banyak, di wilayah Jakarta Timur saja dari 13000 kader jumlah kader perempuan mencapai 6905 kader. Jumlah banyak atau sedikitnya kader partai bukan menjadi suatu penghalang untuk kaum perempuan PKS dalam berkontribusi partai. Ini merupakan pembuktian perkembangan bahwa perempuan berkembang dalam dunia politik. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kerja keras perempuan itu sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk menarik simpati masyarakat dan memberikan pemahaman akan pentingnya perempuan untuk ada di dunia politik.

D. Pola Partisipasi Kader Perempuan PKS

Kesuksesan suatu partai politik tidak terlepas dari peran kader yang memutuskan untuk bergabung dalam partai tersebut. Kader yang telah bergabung

⁵⁸ Wawancara dengan Ustadz Mamba pada Tanggal 16 September 2016 Pukul 16.00.

dengan sebuah partai dapat diartikan menjalin komitmen antara kader dengan partai. Partisipasi yang dibuat oleh kader berpengaruh terhadap suara partai dan peningkatan jumlah kader partai. Partai Keadilan Sejahtera membuat sebuah strategi kepartaian dalam menarik suara dengan menempatkan kader perempuan sebagai garda terdepan partai. Perempuan dalam partai PKS memang difokuskan untuk kegiatan-kegiatan sosial, dikarenakan perempuan lebih bersahabat dan mempunyai komitmen lebih tinggi. Perempuan juga dimasyarakat lebih banyak komunitas yang terbentuk dibanding laki-laki, seperti PKK, ta'lim dan jumantik. Sehingga perempuan yang dirasa lebih tepat untuk dapat terjun di masyarakat.

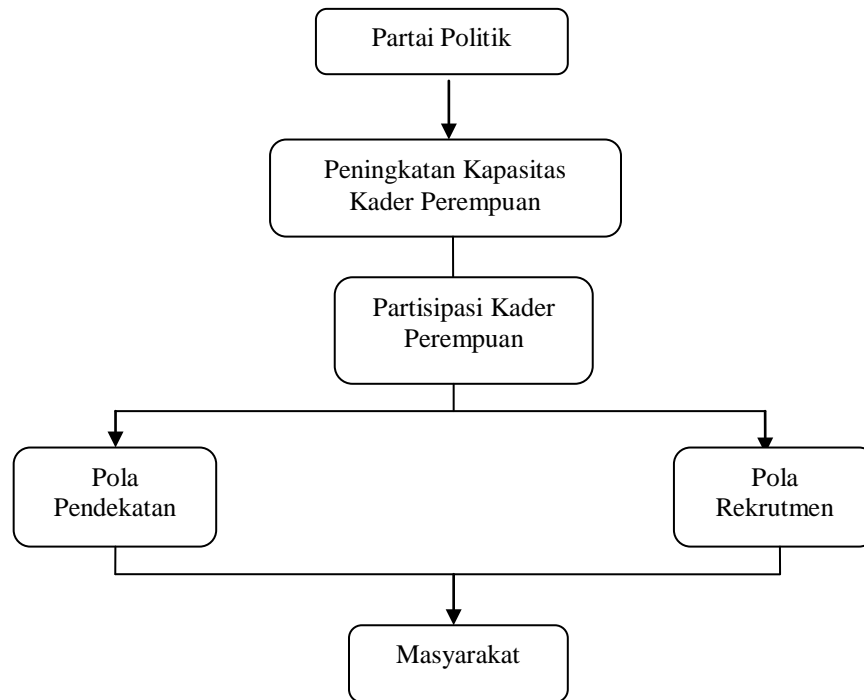
“Kader perempuan dalam PKS itu bisa dibilang menjadi garda terdepan dalam mengambil simpati suara masyarakat. karena perempuan dianggap paling bisa komitmen ditengah masyarakat dan dapat berbaur ditengah mereka.”⁵⁹

Kader perempuan menjadi bagian terdepan dalam partai membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para kader perempuan ini disesuaikan dengan strategi kepartaian. Partai keadilan sejahtera memiliki tiga biro untuk menaungi partisipasi perempuan, ketiga biro yang dibentuk tersebut memiliki tujuan agar kader perempuan dapat menjadi pembina masyarakat yang baik pada sebuah komunitas maupun masyarakat secara umum. Dalam struktur bidang perempuan PKS disebut sebagai bidang perempuan dan ketahanan keluarga atau BPKK, yang tugas utamanya untuk melatih para kader untuk dapat menjadi basis massa.

“Perempuan pelopor yang bekerja mulai dari basis massa akar rumput harus bekerjasama dengan banyak pihak, antara lain, agar hasil kerja tersebut memberi dampak sosial yang besar dan dapat membawanya pada puncak prestasi yang mendapat pengakuan publik.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fika pada tanggal 6 Oktober 2016 Pukul 10.00.

Skema 3.1 Pola Partisipasi Perempuan PKS



Hasil Interpretasi Peneliti, 2017

Para kader perempuan dipersiapkan untuk dapat memberikan hal positif kepada masyarakat, Para kader juga dilatih dalam program-program yang dibuat oleh biro Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan (PKKP) yang bertujuan menguatkan kemampuan kader dengan pengetahuan beserta kemampuannya. Adanya biro ini para kader perempuan diharapkan meningkatkan kualitas mutu kader sehingga siap untuk bergerak dimasyarakat.

Jumlah kader yang terus berubah pertahun dan adanya regenerasi kader mengharuskan partai membuat pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi kader. Sehingga para kader dapat ikut terlibat dalam lembaga strategis

⁶⁰ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu FIka pada tanggal 16 Oktober 2016 Pukul 10.00.

partai untuk bersama merumuskan kebijakan partai. Selain itu juga dapat mengevaluasi bidang perempuan secara spesifik.

“Dalam bidang perempuan ada namanya biro Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan (PKKP), biro ini dibentuk dibawah naungan bidang perempuan. dalam biro ini para kader PKS dilatih dan diberikan pembinaan supaya dapat mempersiapkan diri untuk diberikan amanah yang dalamstruktur partai”⁶¹

Pelatihan dilakukan oleh biro PKKP salah satunya memberikan pengetahuan kepada para kader perempuan untuk membangun sebuah jaringan. Jaringan yang terbangun dalam kader perempuan untuk dapat memudahkan membina masyarakat. Sebagai bagian terdepan dalam partai,kinerja partisipasi perempuan PKS sangat berpengaruh dalam pendekatan terhadap simpatisan partai dan rekrutmen kader-kader baru partai. Berawal dari pelatihan di biro PKKP akan memunculkan ide-ide dari para kader yang akan disatukan dan dibangun untuk menjadi kepentingan bersama.

Ide-ide yang dikeluarkan dipelatihan tidak terlepas dari peran perempuan dalam partai sebagai pemberi solusi atas beragam persoalan dimasyarakat. Memiliki visi “membangun keluarga kokoh dan dapat berkontribusi untuk negeri”, artinya para kader perempuan partai disiapkan untuk membangun negara dengan memperbaiki persoalan-persoalan dimasyarakat. Sebagaimana penuturan ketua bidang perempuan, bahwa perempuan dapat ikut berkontribusi membangun negara tanpa harus meninggalkan kewajibannya, sehingga bentuk-bentuk kegiatan yang dijalankan para kader perempuan bersifat sosial seperti pemeriksaan kesehatan, seminar, tabligh dan kegiatan yang bersifat sosial lainnya.

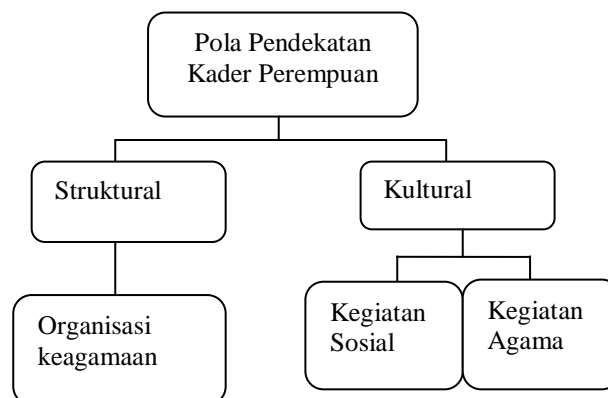
⁶¹ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sugianti pada tanggal 11 Mei 2016 Pukul 17.00

“kegiatan kami kebanyakan kegiatan sosial ya, yang terjun langsung ke masyarakat. para kader kitakan banyak jumlahnya dan beberapa diantaranya punya keahlian dibidang-bidang tertentu. misalnya psikologi, kesehatan, agama itu kita manfaatkan ilmunya untuk dibagi. Nah dibaginya itu bukan hanya ke internal kita aja tapi juga ke masyarakat umum. Selain untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka, ya diselipkan untk memperkenalkan partai”⁶²

1. Pola Pendekatan Kader Partai

Mencari kader partai harus melalui proses-proses pendekatan kepada individu agar memunculkan sebuah kepercayaan. Kader perempuan Partai keadilan sejahtera memiliki cara pendekatan khusus terhadap masyarakat untuk dapat menarik simpati dan kepercayaan mereka terhadap partai dan pada akhirnya mendapatkan kader-kader baru dari cara tersebut. Sepeti yang tergambar dalam skema pola pendekatan PKS, pola pendekatan tersebut terbagi menjadi dua cara yaitu kultural dan struktural. Pendekatan kultural dibagi lagi menjadi dua cara yaitu dengan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga sudah menjadi agenda dari partai itu sendiri.

Skema 3.2 Pola Pendekatan Kader Perempuan



Hasil Interpretasi Peneliti, 2017

⁶² Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sugianti pada tanggal 11 Mei 2016 Pukul 17.00

Kegiatan sosial yang dilakukan partai tidak hanya memperdayakan kader-kader partai namun juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melalui ajakan tersebut itu merupakan suatu tindakan pendekatan yang dilakukan partai. Selain kegiatan sosial ada juga kegiatan keagamaan, seperti misalnya PKS membuat kegiatan tabligh atau pengajian, kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang dibuka untuk umum. Dari acara tersebut diharapkan masyarakat umum akan mengenal partai lebih jauh dan berminat untuk gabung kedalam partai.

Pola pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan struktural, pendekatan ini masuk melalui lembaga-lembaga kepemimpinan yang berlandaskan ideologi Islam. Prosesnya melalui kader aktif yang masuk kedalam lembaga tersebut dan memberikan pengetahuan soal keagamaan. Kader tersebut akan melihat individu yang memiliki pemikiran yang sama dan akan diikutsertakan menjadi calon kader. Selain itu bidang perempuan mempunyai biro yang dinamakan FORSITMA atau Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim. Biro ini dikhususkan untuk dapat menjalin komunikasi yang baik antar majelis ta'lim yang ada di Jakarta Timur. Hal ini akan memudahkan kader perempuan untuk mengajak para ibu-ibu majelis ta'lim dalam suatu acara yang diadakan partai, seperti halnya yang dilakukan para kader Jakarta Timur. Mengadakan sebuah perlombaan dengan mengajak peserta ibu-ibu majelis ta'lim dalam rangka menjalin silaturahmi dan mensosialisasikan pasangan calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera. Panitia acara dengan mudah mengajak para Ibu

majelis ta'lim dikarenakan adanya forsitma dimana dalam forum tersebut terdapat nama-nama majelis ta'lim yang berada di wilayah Jakarta Timur.

“ibu-ibu majelis ta'lim di wilayah ini sudah sering diajak kerjasama dalam kegiatan-kegiatan partai, jadi sebagai panitia mudah mengajak mereka. Ada beberapa majelis disini yang ikut forsitma sehingga lebih gampang untuk komunikasinya”⁶³

Forsitma memudahkan para kader-kader perempuan untuk dapat memobilisasi massa untuk ikut kegiatan yang diadakan mengatasnamakan partai. Karena jumlah majelis ta'lim yang cukup banyak sehingga dapat memeriahkan acara dengan mendatangkan cukup massa.

Gambar 3.1 Kegiatan Cerdas Cermat Majelis Ta'lim



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016

Gambar diatas merupakan foto salah satu kegiatan yang menampilkan para ibu majelis ta'lim seiasi mengikuti perlombaan. Ini merupakan sebuah kegiatan

⁶³ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu FIka pada tanggal 16 Oktober 2016 Pukul 10.00.

perlombaan antara majelis ta'lim yang dibuat oleh kader perempuan yang tujuan utamanya untuk memperkenalkan pasangan calon pemilihan gubernur dari partai mereka. Cara ini merupakan cara partai untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kader-kader perempuannya. Selain membuat perlombaan majelis ta'lim, para kader perempuan membuat kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk umum.

Gambar 3.2 Foto Kegiatan Pelayanan Kesehatan



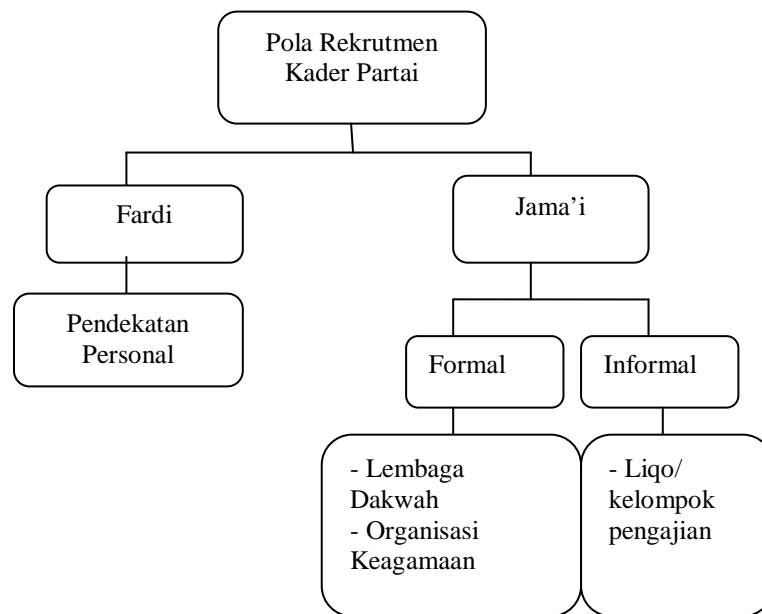
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2016

Selain mengadakan acara dengan mengundang para ibu-ibu majelis ta'lim, kader perempuan juga mengajak ikut serta masyarakat dengan mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan menarik simpatik masyarakat terhadap partai dan meninggalkan kesan positif pada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan bisa dibidang sebagai suatu pendekatan antara partai dan masyarakat melalui kader perempuan.

2. Pola Perekrutan Kader Partai

Skema 3.1 Pola Perekrutan Kader Partai



Hasil Interpretasi Peneliti, 2017

Skema diatas merupakan sebuah pola perekrutan yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera. Setelah melakukan pendekatan para kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dengan mudah dapat merekrut kader baru. Cara yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan cara pendekatan. Dalam pola perekrutan dinamakan dengan cara rekrutmen Fardi dan rekrutmen Jama'i . Proses ini tidak hanya dilakukan oleh kader perempuan namun juga kader laki-laki, akan tetapi kader

perempuan mempunyai peluang lebih besar dikarenakan memang tugasnya dalam partai menjadi bagian penting dalam hubungan dengan masyarakat.

“kader perempuan lebih mudah untuk mengajak atau merekrut kader-kader baru, karena kami langsung komunikasi dengan lingkungan jadi lebih tahu mana saja yang sekiranya bisa diajak untuk bergabung atau hanya menjadi simpatisan saja. Kalau ada ikhwan (laki-laki) misalnya yang dapat didekati dan diajak gabung biasanya kader perempuan menyampaikan kepada kader laki-laki”⁶⁴

Rekrutmen fardi adalah rekrutmen yang dilakukan oleh kader dengan pendekatan individual terhadap satu atau dua orang atas inisiatif sendiri atau atas rekomendasi seorang murrabbi⁶⁵. Pertama dilakukan dengan cara seseorang kader mencari calon peserta tarbiyah⁶⁶, dimana calon tersebut kemudian dikondisikan melalui tahap tahap, antara lain: ta’aruf (pengenalan dan pendekatan), ikhtiar (upaya mempengaruhi si calon), dan taqarrub (mendekatkan atau menghubungkan si calon dengan komunitas Tarbiyah). Hasil dari upaya pemantauan ini kemudian dilaporkan, dibicarakan, dan dianalisis dalam forum halaqoh⁶⁷ berdasarkan standar syarat syarat peserta tarbiyah. Jika memenuhi syarat maka ia akan diarahkan untuk mengikuti halaqoh tarbiyah.

Sistem rekrutmen Jama’I merupakan proses rekrutmen yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan dua cara yaitu formal dan informal. Rekrutmen jama’I dengan cara formal melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu Training Orientasi Partai Satu (TOP1) yang akan menghasilkan anggota pemula tersebut akan

⁶⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eka pada tanggal 6 Januari 2017 Pukul 19.00 WIB.

⁶⁵ Murabbi adalah sebutan untuk seorang yang dianggap guru dalam suatu kelompok

⁶⁶ Tarbiyah adalah pendidikan dalam bahasa Arab

⁶⁷ Halaqah adalah kelompok kecil muslim yang rutin mengkaji agama Islam

dibina intensif dalam holaqoh tarbiyah. Setelah itu calon anggota pemula yang terdaftar akan mengikuti kegiatan Ta'lim Rutin Partai (TRP). Sedangkan kualifikasi terendah hanya mendapatkan kartu tanda anggota (KTA).

“selain menggunakan sistem pendekatan personal, untuk merekrut kader kadang kita cari dari organisasi-organisasi yang lebih bersifat keagamaan, misalnya kaya remaja masjid atau lembaga dakwah. Cara ini lebih memudahkan untuk ajak gabung, soalnya mereka sudah ada pemahaman dasar sebelumnya tentang politik dan agama. Jadi tinggal mencari yang satu visi dengan partai”⁶⁸

Tahapan kedua yaitu Training Orientasi Partai 2 (TOP2), tahapan kedua ini bertujuan untuk menjadikan calon kader sebagai anggota pemula terbina. Sistem rekrutmen jama'I dengan cara non formal terbagi menjadi dua cara yaitu kegiatan sosial dan melalui organisasi keagamaan. Pertama dengan kegiatan sosial dilakukan dimasyarakat umum untuk merekrut calon kader menjadi peserta tarbiyah level pemula. Kedua, melalui organisasi keagamaan yang berafiliasi ke ideology partai seperti Rohis dan Lembaga Dakwah. Hasil dari proses rekrutmen ini diarahkan mengikuti tarbiyah anggota pemula.

. Dikenal sebagai partai dari gerakan tarbiyah, partai ini cenderung sering melakukan kegiatan masa yang bertemakan keagamaan. Oleh karena itu setiap kader diwajibkan mempunyai kelompok kecil atau yang disebut *holaqoh* dengan anggota lima sampai duabelas orang dan dipandu oleh seorang yang dinamakan *murabbi*. Tujuan utama dibentuk kelompok ini untuk selalu memberikan pengetahuan tentang keagamaan.

⁶⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eka pada tanggal 6 Januari 2017 Pukul 19.00 WIB.

“PKS sendiri mempunyai cara khusus dalam merekrut kader, melalui pendekatan kita bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Namun tetap berusaha mengajak setidaknya untuk mereka mau berpartisipasi saja itu sudah cukup. Tapi kita tetap memberikan mereka pengetahuan- pengetahuan dakwah dan juga soal politik. Biar walaupun mereka tidak ikut partai tapi mereka mengerti bagaimana kondisi politik dinegaranya sendiri.”⁶⁹

Setiap kader partai dibetuk menjadi individu yang mempunyai peran bertanggung jawab untuk berdakwah tidak terkecuali dalam politik. Sehingga terbentuk suatu pemikiran bahwa politik bukan hanya soal cara untuk bagaimana bisa mendapatkan suara banyak dan berkuasa. Tetapi juga bagaimana mereka bisa melakukan dakwah ajaran Islam melalui dunia politik. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berbasis agama Islam yang kuat, sehingga setiap yang kegiatan yang dilakukan berlandaskan ajaran agama Islam.

E. Penutup

Bab ini menjelaskan bagaimana cara untuk dapat membuat partisipasi perempuan meningkat. Bagaimana perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dapat menyadari pentingnya perempuan dalam partisipasi politik. Partai politik sebagai sebuah wadah partisipasi politik juga berperan dalam membuat kepekaan perempuan untuk dapat mempergunakan hak dan kewajibannya dalam politik. Perempuan yang telah menjadi kader partai juga berusaha mencari cara untuk meyakinkan perempuan –perempuan yang lain yang masih tidak mengetahui dunia politik untuk dapat meyakinkan mereka bahwa perempuan juga harus mempergunakan haknya dan kewajibannya dalam politik.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Diki Junaedi pada tanggal 13 Mei 2016 Pukul 18.30

Partai Keadilan Sejahtera mempersiapkan kader-kader perempuannya untuk menjadi bagian terdepan dalam partai, yang artinya mempersiapkan para kader untuk dapat mencari suara dari masyarakat. Suara yang didapatkan merupakan sebuah dukungan terhadap partai dalam segala kegiatan partai dan diharapkan dapat menjadi suara pendukung besar partai. Memiliki tiga biro dibawah naungan bidang perempuan, PKS mempersiapkan kader berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam mengasah kemampuan para kader. Setelah itu para kader yang sudah diberikan pelatihan bisa menjadi penggagas dalam masyarakat sehingga masyarakat merasakan keberadaan perempuan PKS.

BAB IV

PEREMPUAN DALAM POLITIK KEPARTAIAN

A. Pengantar

Politik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu negara, karena adanya politik dapat membangun sebuah negara. Politik tidak dapat berjalan tanpa adanya aktor yang memerankan politik tersebut. Aktor politik tersebut adalah masyarakat didalam negara itu sendiri. Namun, kenyataannya belum semua masyarakat dapat menjalankan haknya sebagai aktor politik. Seperti perempuan yang masih banyak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sehingga perempuan tidak bebas menjalankan haknya sebagai warga negara. Melihat hal itu, pemerintah dalam sebuah undang-undang mengatur ketentuan hak politik perempuan. Perempuan diharuskan ada sekitar 30% dalam politik. Populasi perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki seharusnya dapat memenuhi kuota 30% yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemenuhan kuota tersebut difasilitasi oleh adanya partai politik sebagai suatu wadah untuk dapat berpartisipasi. Hadirnya partai politik seharusnya bisa membantu meningkatkan jumlah partisipasi perempuan. Beberapa partai politik juga membantu mewujudkan hal tersebut dengan membuat bidang perempuan didalam struktur partai. Hal ini dilakukan karena kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki sehingga dibutuhkan ruang untuk perempuan berpartisipasi.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang persoalan perempuan dalam partai politik. Pada subbab pertama akan dijelaskan kedudukan perempuan dipartai politik, bagaimana perempuan berpartisipasi dalam partai. Subbab selanjutnya akan membahas tentang hambatan perempuan dalam politik. Hadirnya perempuan dalam politik pasti melewati hambatan-hambatan yang akhirnya bisa dilalui perempuan tersebut. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan tersebut akan dibahas pada subbab tersebut. Terakhir, membahas gender dalam politik partai. Isu gender merupakan sebuah isu yang sudah mendunia, peranan perempuan dalam berbagai hal terbentur dengan isu gender, termasuk dalam hal berpolitik.

B. Kedudukan Perempuan dalam PKS

Membahas mengenai partisipasi politik artinya fokus pada peran partai politik sebagai pelaku utama partisipasi, tetapi seiring dengan berkembangnya kesadaran demokrasi memunculkan berbagai kelompok masyarakat yang ingin ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Miriam Budiardjo mengatakan dalam bukunya bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah⁷⁰. Masyarakat yang berada di negara demokrasi umumnya lebih baik karena lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi. Karena tingginya tingkat partisipasi pada suatu

⁷⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hlm.369

negara mengartikan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik negaranya dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Sistem demokrasi membantu pembangunan negara. Adanya campur tangan masyarakat akan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya adanya partisipasi politik menunjukkan adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Di negara berkembang, adanya partisipasi akan mempercepat pembangunan karena berhasil-tidaknya pembangunan sebuah negara banyak bergantung dari partisipasi masyarakat. Indonesia termasuk dalam negara berkembang, sehingga adanya partisipasi di Indonesia diharapkan mempercepat pembangunan negara ini.

Dalam berpartisipasi tidak ada batasan dan larangan bagi siapapun yang ingin ikut berpartisipasi. Namun pada kenyataannya perempuan masih terbatas dalam berpartisipasi politik. Adanya perempuan dalam politik merupakan cermin sebuah keadilan. Dalam demokrasi sedang berusaha diwujudkan partisipasi politik perempuan. Rendahnya angka partisipasi perempuan merupakan suatu kegagalan demokrasi. Karena dalam demokrasi siapa saja dapat menggunakan hak-haknya, tidak ada pembeda antara suku, ras, agama maupun gender. Maka dari itu saat ini banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Di Indonesia angka partisipasi perempuan juga cenderung rendah. Hal ini menjadi satu masalah khusus akhirnya menjadi perhatian yang serius dan pada

akhirnya memaksa pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur adanya perempuan dalam politik. Dibuatnya undang-undang dalam mengatur partisipasi perempuan merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap perempuan. Kenyataannya kebijakan yang telah dibuat menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan di Indonesia. Perlu adanya penekanan pemenuhan hak-hak perempuan termasuk hak politik bisa terakomodir.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan sebuah partai yang melakukan proses rekrutmen dengan seleksi yang bertahap. Dalam buku sistem politik, Haryanto mengatakan proses rekrutmen ini dilakukan untuk merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin⁷¹. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai.

Mempersiapkan sumber daya dalam partai diperlukan partisipasi aktif para kader untuk dapat memajukan partai dan mengambil suara masyarakat terhadap partai. Untuk itu keharmonisan dalam kerjasama antara kader dengan sistem partai. Mewujudkan kerjasama yang harmonis perlu adanya pembagian kerja dan pemenuhan hak yang adil antara kader laki-laki dan kader perempuan. Didunia

⁷¹ Haryanto, 1982, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.51

politik belum banyak perempuan yang menyadari bahwa perannya sangat dibutuhkan. Maka dari itu, adanya kader perempuan dalam partai politik merupakan suatu asset bagi partai untuk dapat menjalin kerjasama demi terwujudnya tujuan politik yang adil.

Dalam dunia politik peran perempuan dapat beraneka ragam. Dipertarungan politik, banyak posisi yang bisa diisi perempuan dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun munculnya berbagai penolakan dalam politik membuat perempuan menjadi sulit berkembang. Kurang adanya dukungan dari sebagian perempuan didasari oleh stigma bahwa pemimpin itu laki-laki, perempuan tidak mampu menjadi pemimpin. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu wacana penting yang ingin direalisasikan oleh semua partai politik, termasuk salah satunya Partai Keadilan Sejahtera.

Menanggapi masalah tersebut PKS merealisasikannya melalui bidang kewanitaan yang secara khusus memiliki kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik. Seperti yang dijabarkan oleh Ketua Umum DPD PKS Jakarta Timur bahwa PKS, Bapak Taufik Zoelkifli Partai Keadilan Sejahtera membangun partisipasi perempuan dalam politik melalui lima hal yaitu; mengoptimalkan peran perempuan dalam segala bidang, mengoptimalisasi peran politik perempuan dengan berpegang pada nilai keislaman, keseimbangan hak pemberdayaan politik, keseimbangan proposional dalam penempatan perempuan di lembaga, dan perhatian terhadap isu kontemporer perempuan.

Merealisasikan hal tersebut Partai Keadilan Sejahtera mewujudkan dengan mengadakan berbagai kegiatan pendidikan politik bagi para kader dan memunculkan berbagai organisasi dan kegiatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi perempuan. Menjadi bagian dari suatu partai bahkan menjadi pengurus didalam partai tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi yang banyak dilakukan perempuan. Demikian halnya dengan para perempuan kader –kader Partai Keadilan Sejahtera. Untuk menjadi pengurus inti dalam kepengurusan partai dibutuhkan waktu lama, sebelum menjadi pengurus inti para kader harus aktif dalam partai untuk beberapa tahun. Seperti Ibu Sugianti yang saat ini menjadi ketua bidang kaderisasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera, memerlukan waktu yang cukup panjang hingga akhirnya dijadikan ketua bidang perempuan.

Partisipasi politik perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera tidak dibedakan dengan partisipasi laki-laki. Namun peran kader perempuan dalam partai berbasis syariat Islam ini lebih cenderung untuk memperbaiki diri agar dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Kader perempuan partai menganggap partai politik merupakan sebuah sarana bagi mereka untuk berkontribusi pada negara dan tidak mementingkan kekuasaan. Partisipasi yang dilakukan perempuan PKS lebih banyak melakukan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Karena para perempuan PKS melihat kondisi negara yang harus diperbaiki dari instansi terkecil yaitu keluarga, dan dimulai dari seorang ibu.

Partisipasi politik itu sendiri dapat dilihat dari empat sudut pandang menurut Michael Rush dan Philip Althoff yaitu melalui bentuk partisipasi politik, seberapa luas partisipasi politik, siapa yang berpartisipasi dan mengapa mau berpartisipasi⁷². Bentuk-bentuk partisipasi dalam penyajiannya memiliki beberapa kesulitan, yaitu para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai dan para demonstran. Dari jajaran partisipasi politik tersebut dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik, Michael dan Phillip membuat hierarki partisipasi politik untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik. Berbagai tingkatan memiliki arti yang berbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain dan tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem, dan akibat kecil pada sistem lainnya.

Kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera memiliki sejumlah organisasi naungan struktur bidang perempuan. Organisasi bawahan ini untuk menampung beberapa kepentingan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari para kader perempuan itu sendiri. Organisasi yang dibentuk kader perempuan berada dibawah naungan partai ini merupakan suatu agen mobilisasi politik. Agen mobilisasi politik yaitu suatu organisasi melalui nama anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan tertentu lewat sistem politik yang bersangkutan⁷³. Kepengurusan organisasi dibawah partai dalam

⁷² Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, hlm. 122

⁷³ *Ibid.*

struktur bidang perempuan adalah sarana bagi perempuan dalam menjalankan partisipasinya.

Peran utama yang dijalankan para kader dalam organisasi-organisasi tersebut adalah menjadi sarana untuk masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang bersifat umum maupun personal. Selain itu juga adanya organisasi tersebut untuk dapat memperkenalkan partai keadilan sejahtera kepada masyarakat umum yang pada akhirnya akan memudahkan partai mengambil dukungan suara. Berbagai macam alasan, individu yang masuk kedalam suatu organisasi politik telah diorganisir oleh partai politik sebagai bagian dari kegiatan politik partai. Dalam partai keadilan sejahtera, peran kader perempuan banyak berkontribusi untuk mengambil suara individu untuk partai. Dikarenakan para kader perempuan dalam partai terbentur dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sehingga para kader melaksanakan partisipasinya hanya dilingkungannya masing-masing.

Sebuah sistem terdapat beberapa fungsi penting untuk dapat mencapai sebuah tujuan, termasuk juga peran perempuan dalam partai politik. Tidak hanya partai, perempuan memerlukan sebuah strategi untuk menyatukan visi dengan partai. Strategi yang dijalankan sebuah partai seharusnya melihat bagaimana kondisi masyarakat dan masalah-masalah sosial dimasyarakat. Adaptasi menurut Parson merupakan sebuah sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan

juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya⁷⁴. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang beridologi Islam, sehingga segala aturan yang ada didalamnya mengikuti syariat-syariat Islam. Dalam syariat Islam peran perempuan dalam publik sangat diatur. Sehingga para perempuan yang menjadi kader partai harus memahami nilai-nilai keislaman. Tidak hanya perempuan, laki-laki yang mau bergabung juga harus memahami nilai-nilai keislaman. Dengan adanya aturan tersebut maka dalam struktur kepengurusan perempuan mempunyai bidangnya sendiri dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan para kader sebagian besar difokuskan untuk perempuan.

Partai keadilan sejahtera menjadikan partai ini sebuah wadah untuk berdakwah. Tujuan utama partai adalah mewujudkan madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut partai ini memulai dengan memperbaiki diri menjadi lebih baik melalui pendekatan agama setelah itu menularkannya ke lingkungan sekitar. Dalam bidang perempuan memiliki visi tersendiri yaitu membangun keluarga yang kokoh dan kontribusi untuk negri. Artinya para perempuan PKS membantu mencapai tujuan utama partai dimuali dengan memperbaiki institusi keluarga yang harmonis dan dapat menghasilkan generasi baru yang baik.

⁷⁴ George Ritzer, Douglas J Goodman, 2011, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta:Kencana, hlm. 121.

Integrasi artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi⁷⁵. Penerapan sistem dalam partai yang didasari dengan asas keagamaan membuat para kader paham lebih jauh tentang agama dalam mengatur politik. Untuk itu untuk menjaga bagian dalam partai, sejak awal partai telah memberikan pengarahan kepada setiap calon kader akan visi dan misi serta strategi partai dalam berpolitik. Sistem dalam partai juga mempengaruhi setiap kadernya berkerja kepada sesama kader partai maupun kepada ke masyarakat umum, sehingga dapat terjaganya sebuah integritas.

Latency atau laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural⁷⁶. Partai Keadilan Sejahtera merupakan sebuah partai dengan menggunakan agama dalam mengatur sistem kepartaiaan. Sehingga sistem tersebut menghasilkan sebuah pola yang mengacu pada syariat-syariat agama dan mempengaruhi individu dalam partai untuk menjadi seorang yang agamis namun tetap berkontribusi dalam pemabngunan negara.

C. Hambatan Perempuan dalam Politik

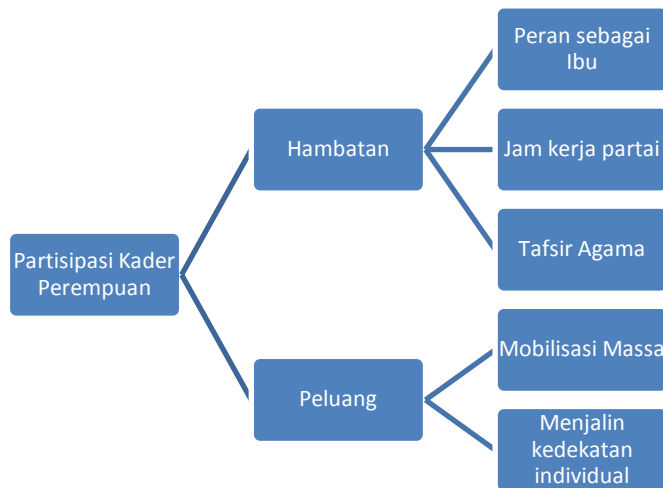
Pengaturan perempuan dalam politik di Indonesia mengartikan minimnya peran perempuan dalam politik. Kewajiban setiap partai untuk memenuhi peraturan tersebut. Saat ini berbagai cara partai politik untuk dapat merekrut perempuan untuk

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

memenuhi kuota perempuan dalam politik. Banyak faktor yang dapat membuat perempuan mau ikut berpolitik dan banyak pula hambatan yang mereka hadapi ketika sudah memutuskan untuk berpolitik⁷⁷. Peranan mereka sebagai istri dan seorang ibu menjadi kendala utama saat mereka berpolitik.

Skema 4.1 Hambatan dan Peluang Partisipasi Kader Perempuan



Interprestasi Penulis, 2017

Keterlibatan perempuan menjadi seorang kader dalam partai merupakan sebuah dorongan dan dukungan dari keluarga dan yang terutama adalah izin dari sang suami. Dengan kata lain, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik merupakan sebuah komitmen yang sebelumnya sudah dibicarakan dengan keluarga terutama kesepakatan dari suami. Hambatan yang terjadi dalam perempuan berpolitik ketika sang suami tidak memberikan izin kepada sang istri untuk berpartisipasi. Hal ini merupakan satu faktor penghambat bagi perempuan dalam berpolitik. Begitu pula

⁷⁷ Tari Siwi Utami, 2001, *Perempuan Politik di Parlemen Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 22-25.

halnya yang terjadi pada kader-kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini menjadi salah satu faktor pasang surutnya jumlah kader perempuan yang aktif didalam partai. Pasang surutnya jumlah kader perempuan dalam partai dikarenakan keputusan mereka untuk menjalankan peran hanya sebagai ibu.

Selain itu faktor yang menjadi hambatan perempuan berpolitik adalah jam kerja yang diterapkan dalam partai seperti pertemuan dan rapat-rapat. Perencanaan kegiatan-kegiatan kepartaian sering dilaksanakan pada malam hari. Dikarenakan sebagian besar kader partai berkerja dan menyelesaikan aktifitas non partai pada pagi hingga siang hari. Walaupun secara tidak langsung partai politik memperbolehkan siapa saja bisa dapat mengikuti kegiatan parpol. Namun bagi perempuan hal itu sangat mengganggu jadwal perempuan karena pada saat yang sama ia harus sudah berada dirumah untuk membimbing anaknya belajar. Kader laki-laki bisa 24 jam dipartai, tapi perempuan tidak, karena merasa tidak ada kewajiban rutin selain menghidupi keluarganya. Selain itu untuk urusan partai laki-laki bisa keluar malam, tapi masyarakat menganggap janggal untuk perempuan keluar malam. Karena mungkin saja suami atau anak tidak mengizinkan untuk keluar malam. Sebab akan mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat disekitar tempat tinggal.

Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah. Hal ini diebabkan oleh beberapa hal misalnya seperti anggapan perempuan mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga. Tafsir agama juga mempengaruhi perempuan berada diruang publik dan

politik merupakan ranah ruang publik. Partai keadilan merupakan partai yang berideologi agama sehingga para kader-kader juga memiliki pemahaman agama yang cukup dalam. Dalam ajaran agama, Islam mengutamakan pemimpin adalah laki-laki. Sehingga ajaran ini mempengaruhi partisipasi perempuan, partisipasi kader PKS hanya sekedar diranah masyarakat dan lebih mendahulukan laki-laki atas kepentingan politiknya.

Hambatan-hambatan diatas dialami sebagian kader perempuan di partai, sehingga mempengaruhi jumlah kader yang aktif dalam partai. Adanya organisasi dibawah struktur bidang perempuan merupakan sebuah solusi bagi para perempuan yang tidak dapat secara aktif tampil depan umum. Dengan terbentuknya organisasi tersebut para kader bisa secara luas menuangkan ide-ide kegiatan yang mendukung partai. Namun sayangnya organisasi yang terbentuk belum dapat memenuhi suara hak perempuan, hanya sekedar memenuhi partisipasi perempuan saja.

Realitas politik Indonesia, persoalan masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan⁷⁸. Berbicara politik, terjadi adanya peminggiran politik terhadap perempuan didalam demokrasi. Ketika perempuan terlibat dalam politik maka perempuan harus masuk dan berperilaku didalam dunia laki-laki. Partisipasi politik di Indonesia khussnya dalam lembaga politik formal, maka terjadi representasi perempuan yang rendah. Isu kesetaraan gender dalam pembangunan merupakan hal

⁷⁸ Joni Lovenduski, 2005, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.88.

yang paling menonjol. Berbagai macam cara dilakukan agar perempuan dapat berpolitik, berbagai aturan dibuat untuk memberikan keadilan.

Permasalahan tentang penghambat partisipasi perempuan dalam politik adalah masalah-masalah klasik yang muncul dari internal dan eksternal perempuan itu sendiri. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara perempuan dan laki-laki⁷⁹. Konstruksi yang telah membudaya dalam masyarakat tentang perempuan yang lemah memunculkan perbedaan peran dalam politik. Posisi perempuan di Indonesia masih didominasi budaya politik patriarki. Ditengah dominasi budaya patriarki maka ruang gerak perempuan dibatasi oleh aturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan laki-laki⁸⁰. Dalam politik Partai Keadilan Sejahtera secara sistem masih menerapkan budaya patriarki, terlihat dari struktur kepengurusan partai di daerah Jakarta Timur, dalam struktur tersebut sebagian besar dipenuhi dengan kaum laki-laki di kepengurusan inti terkecuali di bidang perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan laki-laki merupakan sosok pemimpin sehingga didahulukan kepentingannya. Berawal dari hal tersebut maka akan memunculkan subordinasi dalam kepengurusan partai. Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan⁸¹. Keputusan partai menempatkan perempuan hanya dibidangnya saja membuat anggapan bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin.

⁷⁹ Tari Siwi Utami, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Joni Lovenduski, *Op. Cit.* hlm 89

⁸¹ *Ibid.*

E. Penutup

Kehadiran perempuan dalam politik memberikan suatu warna yang berbeda dalam proses politik tersebut. Partisipasi politik sendiri memberikan kesempatan yang luas kepada siapapun yang ingin berpartisipasi, tidak hanya melalui partai tapi juga bisa melalui hanya dengan memberikan suaranya. Partai politik dirasa adalah wadah yang cukup tepat untuk menjalankan partisipasi. Namun, harus adanya unsur keadilan dalam menjalankan partisipasi dalam sebuah partai. Artinya sebuah partai harus memberikan kesempatan yang sama kepada kader-kadernya untuk dapat berpartisipasi.

Kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera berpartisipasi pada partai untuk memobilisasi massa untuk partai. Perempuan dalam partai dianggap lebih berkomitmen dan mampu mengajak massa dalam berpolitik ataupun hanya sekedar berpartisipasi dalam kegiatan partai. Partisipasi yang dilakukan kader perempuan ini setidaknya memberikan kesan baik dimasyarakat terhadap partai hal ini sesuai dengan tujuan perempuan partai untuk dapat memberikan dampak positif pada lingkungan. Perjalanan politik perempuan mempunyai hambatan-hambatan yang dilewati. Rasa percaya diri yang penuh merupakan sebuah modal bagi perempuan yang ingin berpartisipasi. Selain itu komitmen yang dibangun antara keluarga, suami dan partai harus dijalani.

Partai Keadilan Sejahtera sudah memberikan kesempatan yang sama pada kader-kadernya, tidak ada pembeda. Kader perempuan dapat berpartisipasi dalam wadahnya sendiri sehingga dapat dengan bebas menjalankan partisipasi. Namun budaya patriarki dalam sistem partai ini masih melekat. Sehingga struktur dalam partai tidak melibatkan perempuan dalam kepengurusan inti kecuali bidang perempuan itu sendiri. Hal ini harus menjadi sebuah evaluasi partai untuk lebih bisa memberikan kebebasan perempuan dalam berpolitik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peranan perempuan dalam bidang politik terbilang cenderung lemah. Stigma tentang perempuan berkerja dalam ranah domestik membuat perempuan terlambat berkiprah dalam politik. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah mewajibkan setiap partai politik untuk mengikutsertakan perempuan setidaknya 30% untuk menjadi calon anggota legislatif. Adanya peraturan ini membuat semua partai berkerja untuk merekrut perempuan untuk aktif dalam partai sehingga pada akhirnya beberapa perempuan dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Sebelum dijadikan calon legislatif, perempuan yang ikut serta dalam partai harus berkerja untuk partai oleh karena itu dibentuklah suatu bidang perempuan dalam struktur partai.

Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera, partai berbasis Islam ini dalam strukturnya mempunyai satu bidang khusus untuk perempuan. Bidang ini dinamakan bidang kewanitaan, yang terbentuk menjadi tiga biro. Bidang kewanitaan dalam partai ini sebagian besar kegiatannya adalah kegiatan sosial yang dengan mudah diterima di masyarakat. Kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera berpartisipasi untuk memobilisasi massa. Kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera memiliki sejumlah organisasi naungan struktur bidang perempuan. Organisasi bawahan ini untuk menampung beberapa kepentingan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari para kader perempuan itu sendiri. Organisasi yang

dibentuk kader perempuan berada dibawah naungan partai ini merupakan suatu agen mobilisasi politik. Agen mobilisasi politik yaitu suatu organisasi melalui nama anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan tertentu lewat sistem politik yang bersangkutan. Kepengurusan organisasi dibawah partai dalam struktur bidang perempuan adalah sarana bagi perempuan dalam menjalankan partisipasinya.

Peran utama yang dijalankan para kader dalam organisasi-organisasi tersebut adalah menjadi sarana untuk masyarakat terkait dengan masalah-masalah yang bersifat umum maupun personal. Selain itu juga adanya organisasi tersebut untuk dapat memperkenalkan partai keadilan sejahtera kepada masyarakat umum yang pada akhirnya akan memudahkan partai mengambil dukungan suara. Berbagai macam alasan, individu yang masuk kedalam suatu organisasi politik telah diorganisir oleh partai politik sebagai bagian dari kegiatan politik partai. Dalam partai keadilan sejahtera, peran kader perempuan banyak berkontribusi untuk mengambil suara individu untuk partai. Dikarenakan para kader perempuan dalam partai terbentur dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, sehingga para kader melaksanakan partisipasinya hanya dilingkungannya masing-masing.

Partai keadilan sejahtera menerapkan proses yang sama dalam proses perekrutan kader dan proses partisipasi para kadernya. Namun untuk perempuan partisipasi mereka masih dibatasi oleh ketentuan syariat agama. Sebagian besar partisipasi perempuan Partai Keadilan Sejahtera cenderung ke masyarakat

dikarenakan sifat perempuan yang bisa lebih komitmen dan sebagian besar banyak organisasi masyarakat yang anggotanya perempuan. Sehingga dengan cara partisipasi politik perempuan ini diharapkan perempuan lebih banyak mengerti politik dan ikut berpartisipasi membangun negara.

Kehadiran perempuan dalam politik memberikan suatu warna yang berbeda dalam proses politik tersebut. Partisipasi politik sendiri memberikan kesempatan yang luas kepada siapapun yang ingin berpartisipasi, tidak hanya melalui partai tapi juga bisa melalui hanya dengan memberikan suaranya. Partai politik dirasa adalah wadah yang cukup tepat untuk menjalankan partisipasi. Namun, harus adanya unsur keadilan dalam menjalankan partisipasi dalam sebuah partai. Artinya sebuah partai harus memberikan kesempatan yang sama kepada kader-kadernya untuk dapat berpartisipasi.

Para perempuan menjalankan partisipasi politik sesuai dengan keinginannya masing-masing. Walaupun dalam perjalanan politiknya perempuan mempunyai hambatan-hambatan yang dilewati. Rasa percaya diri yang penuh merupakan sebuah modal bagi perempuan yang ingin berpartisipasi. Selain itu komitmen yang dibangun antara keluarga, suami dan partai harus dijalani. Selain itu faktor yang menjadi hambatan perempuan berpolitik adalah jam kerja yang diterapkan dalam partai seperti pertemuan dan rapat-rapat. Perencanaan kegiatan-kegiatan kepartaian sering dilaksanakan pada malam hari. Dikarenakan sebagian besar kader partai berkerja dan menyelesaikan aktifitas non partai pada pagi hingga siang hari.

Partai Keadilan Sejahtera sudah memberikan kesempatan yang sama pada kader-kadernya, tidak ada pembeda. Kader perempuan dapat berpartisipasi dalam wadahnya sendiri sehingga dapat dengan bebas menjalankan partisipasi. Namun budaya patriarki dalam sistem partai ini masih melekat. Sehingga struktur dalam partai tidak melibatkan perempuan dalam kepengurusan inti kecuali bidang perempuan itu sendiri. Penerapan pemahaman agama membuat kader-kader perempuan dalam partai berkerja dengan pemikiran bahwa partisipasi adalah sebuah kontribusi yang dilakukan untuk memperbaiki negeri. Sehingga kegiatan-kegiatan sosial adalah wujud dari partisipasi mereka dalam memperbaiki masyarakat menjadi lebih baik sehingga mewujudkan negara yang lebih baik juga.

B. Saran

Perempuan hadir dalam dunia politik haruslah didukung penuh dari masyarakat. Besarnya dukungan yang hadir untuk perempuan membuat mereka berani menampilkan kemampuan politiknya dan dapat bersaing dengan laki-laki dalam bidang politik. Tingginya minat perempuan dalam berpartisipasi menjadikan dunia politik lebih berwarna. Partai politik sebagai fasilitator masyarakat sudah seharusnya membuat perempuan dapat menjadi lebih aktif dalam politik. Pembagian kerja dalam partai harus adil agar tidak terjadi ketidakadilan pada kader-kader partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiharjo, Miriam. 2008,. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Creswell, John. W. 2010. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lovenduski, Joni. 2005, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius
- Rush, Michael dan Philip Althoff, 2008, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012,. *Dilema PKS (Suara dan Syariah)*. Jakarta: KPG
- Mumiati, A Nunung P. 2004. *Perempuan Indonesia dalam Prespektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indosiatara
- Nugroho , Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, George, Douglas J Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Robert, K.Yin. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2008. *Social Mapping (Metode Pemetaan Sosial) Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*, Bandung: Rekayasa Sains
- Utami, Ir. Tari Siwi. 2001, *Perempuan Politik di Parlemen Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta: Gama Media

Sumber Tesis/Jurnal

- Budiarti, Aisya Putri. Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD., *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Vol.15 No1, 2012, 19-28. Diakses melalui halaman web <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/viewFile/15/9>. Pada tanggal 6 Januari 2017.
- Lubis, Dina Anggita. "Partisipasi Politik Perempuan Di DPD PKS". *Dalam Tesis Program Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana*. (Medan:Universitas Sumatra Utara, 2009).
- Arifin, Hamid. "Representasi Perempuan dalam Pers". *Jurnal Komunikasi Massa*. vol.1, No 1, 2007, 8 - 17. Diakses dari halaman web <https://www.scribd.com/doc/3198405/Jurnal-Komunikasi-Massa-Vol-1-No-1-Juli-2007>. Pada tanggal 26 Januari 2017.
- Miichi, Ken. "Islamic Youth Movement In Indonesia". *IIAS Newsletter*. No 32, 2003 hlm.22. diakses melalui halaman web http://www.iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL32_22.pdf. diakses pada tanggal 1 April 2016.
- Listyaningsih. "Partisipasi Politik Perempuan dan Pembangunan di Banten". *Jurnal Administrasi Publik*. Serang: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol.1, No 2, 2010, 146-166. Diakses dalam halaman web <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49017&val=4026>, Pada tanggal 2 Maret 2016.
- Mariani, Mack. Bryan W Marshall. A Lanethea Mathews-Schultz. "Party, Ideology and the Influence of Female Role Models On Young Women". *Political Research Quarterly*. USA:Xavier University, 2015, 716-731. Diakses pada halaman web <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1065912915605904?ssource=mfr&rss=1&>. Pada tanggal 2 September 2016.
- Zainuri, Muhammad. "Partisipasi Politik Perempuan (Prespektif: Tradisi Islam Kudus)". *Dalam Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik, Program Pascasarjana*. (Semarang:Universitas Diponegoro, 2007).
- Hasan, Nur. "Hambatan Umum Kiprah Perempuan Dalam Politik". *Jurnal Perempuan*. Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan. Vol.2, No.1, 2013, 2-15 diakses dalam halaman web <http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>. Pada tanggal 18 Januari 2017.

- Partini. “Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia”. *Jurnal Perempuan* Vol. 19 , No.2, 2014, 68-83. Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan.
- Maryanti, Sabar. “Perempuan (Transformasi Menuju Partai Politik)”. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol.3, No1, 2011, hlm 19-29. Diakses melalui halaman web <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141300&val=5855> Pada tanggal 19 Februari 2016.
- Adelina, Shelly dan Ani Soetjipto. “ Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai : Strategi Gender”. *Jurnal Perempuan*. Vol.19, No.2, 2014, 50-79.Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Tanti Hermawati, Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender, *Jurnal Komunikasi Massa*, UNS: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1 No.1, 2007, 18 - 29. Diakses dari halaman web <file:///C:/Users/Septya/Downloads/Jurnal%20Komunikasi%20Massa%20Vol%201%20No%201%202007.pdf>. Pada tanggal 26 januari 2017.

Website

<http://bawaslu-sumut.org/Undang-undang/42UU%20Nomor%2008%20Tahun%202012%20Tentang%20Pemilu%20DPDR,%20DPD,%20dan%20DPRD.pdf>

<https://www.bps.go.id>

http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/profil-anggota-legislatif-2014-2019-potensi-dominasi-fraksi-makin-kuat-2.html

www.kabarpks.com

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Partai :

1. Bagaimana anda melihat kondisi politik saat ini ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kiprah perempuan dalam politik?
3. Bagaimana cara PKS merekrut kader-kader baru?
4. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam PKS dan adakah pembeda antara partisipasi perempuan dan laki-laki?
5. Bagaimana proses partisipasi perempuan dalam partai?
6. Bagaimana kondisi partisipasi politik perempuan saat ini?
7. Apa yang membuat anda mau bergabung dalam partai?
8. Sejak kapan bergabung dengan partai keadilan sejahtera?
9. kenapa memilih Partai Keadilan Sejahtera ?

Riwayat Hidup



Tryseptya Indah Permata, lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1993, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Basaryanto dan Ibu Retno Wijayanti. Pendidikannya dimulai dari lembaga non formal taman kanak-kanak MArgalaksana Jakarta pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan pendidikan formal Sekolah Dasar selama 6 tahun, dan menamatkan pada tahun 2005 di SDN Malaka Sari 04 Jakarta. Kemudian melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang sekolah di SMP Negeri 139 Jakarta hingga tahun 2008 dan SMA Negeri 59 Jakarta hingga 2011. Pada tahun 2012, melalui jalur SNMPTN Tulis, penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Pembangunan angkatan 2012, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Selama perkuliahan, peneliti banyak melakukan penelitian pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Perkotaan, Ekologi Sosial, Evaluasi Program Pembangunan, Sosiologi Industri, Sosiologi Organisasi, Sosiologi Gender, dan pada tingkat akhir penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan di Desa Kunjir, Lampung Selatan. Selanjutnya, penulis melakukan praktek kerja lapangan sebagai peserta magang di PT.ASABRI selama dua bulan. Bagi yang ingin berkorespondensi dengan penulis bisa melalui email: triseptya93@gmail.com